



2025 LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D

Penanggung Jawab:

Aulia, S.TP., MM

Penyusun:

Sri Dharmawati SP., M.M

Rif'ah Saniyah, S.E., M.Si

Trisnaningsih, S.Sos

Eka Susanti, S.Sos

Novi Susanti, S.E.

AGRO MODERN



**SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen



AGRO MODERN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun atas wujud akuntabilitas kinerja dalam menunaikan tugas dan fungsi serta Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran kegiatan dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yaitu Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja yang disusun oleh Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja unit di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026
Sekretaris Badan,

AGRO MODERN

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	VII
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi	1
1.3. Tantangan dan Peran Strategis	4
BAB II.....	5
2.1. Rencana Strategis Organisasi	5
2.2. Perjanjian Kinerja	7
BAB III	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV	48
LAMPIRAN.....	50

AGRO MODERN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025.....	9
Tabel 2.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 3.	Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Intern Itjen Tahun 2024 Lingkup BRMP	14
Tabel 4.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025	15
Tabel 5.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 Terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	16
Tabel 6.	Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024	17
Tabel 7.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025	18
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 terhadap Target Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	18
Tabel 9.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025	21
Tabel 10.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 Periode Tahun 2023- 2025	21
Tabel 11.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 terhadap Target Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	22
Tabel 12.	Nilai Kesembilan Unsur SKM Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025	25
Tabel 13.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025	26
Tabel 14.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	26
Tabel 15.	Nilai Unsur Survei Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP Tahun 2025	28
Tabel 16.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025	30
Tabel 17.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	30
Tabel 18.	Monitoring Penggunaan SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025	35

Tabel 19. Efisiensi SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025	36
Tabel 20. Hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM per Area Sekretariat BRMP Tahun 2025	39
Tabel 21. Pagu Total dan Pagu Efektif Sekretariat BRMP TA 2025	41
Tabel 22. Realisasi PNBP Sekretariat BRMP Tahun 2025	42

AGRO MODERN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi pegawai Sekretariat BRMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 2. Komposisi pegawai Sekretariat BRMP Berdasarkan Jabatan	3
Gambar 3. Cascading Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan	6
Gambar 4. Perubahan PK Sekretariat BRMP Tahun 2025	8
Gambar 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Tahun 2025 22	
Gambar 6. Nilai Efisiensi SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025	34
Gambar 7. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	39
Gambar 8. Perbandingan Pagu Efektif dan Realisasi SP2D BRMP TA 2025 ...	41
Gambar 9. Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat BRMP Periode 2024-2025	42

AGRO MODERN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat BRMP	50
Lampiran 2. Komposisi SDM Sekretariat BRMP Tahun 2025	51
Lampiran 3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029	52
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BRMP Tahun 2025.....	53
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Revisi I Sekretariat BRMP Tahun 2025.....	54
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Revisi II Sekretariat BRMP Tahun 2025.....	55
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir Sekretariat BRMP Tahun 2025	56
Lampiran 8. SOP Pengumpulan Data.....	57
Lampiran 9. SOP Penyusunan Lakin	58
Lampiran 10. SK Tim Evaluasi AKIP Sekretariat BRMP	59
Lampiran 11. Manual IKS Sekretariat BRMP Tahun 2025	63
Lampiran 12. Rencana Aksi Sekretariat BRMP Tahun 2025	69
Lampiran 13. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024	75
Lampiran 14. Matriks LHP BPK Tahun 2024 pada BSIP	76
Lampiran 15. Nilai IKPA Lingkup BRMP Tahun 2025	77
Lampiran 16. Hasil Pelaksanaan SKM OPP Lingkup BRMP Tahun 2025	79
Lampiran 17. Rincian Hasil Survei Kepuasan Eselon II Terhadap Pelayanan Sekretariat BRMP Tahun 2025	97
Lampiran 18. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) BRMP Tahun 2025.....	98
Lampiran 19. Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat BRMP TA 2025 (OMSPAN 13 Januari 2026)	105

AGRO MODERN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Sekretariat BRMP) tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Sekretariat BRMP) telah menetapkan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Seluruh program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2025 adalah: 1) Mewujudkan birokrasi yang baik, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan BRMP; 2) Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran perakitan dan modernisasi pertanian agar berkinerja sangat baik, akuntabel dan berkualitas.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka pada tahun 2025 Sekretariat BRMP mengemban target kinerja dengan sasaran kegiatan: 1) Ditindaklanjutnya hasil temuan pengawas internal dan eksternal; 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian; 3) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan 4) Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat kategori keberhasilan, yaitu 1) sangat berhasil jika capaian >100%, 2) berhasil jika capaian 80-100%, 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat BRMP dapat dikatakan **Sangat Berhasil**, dengan capaian indikator rata-rata sebesar **103,98%**. Dari 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja, tercatat seluruh indikator kinerja Sangat Berhasil (capaian >100%). Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dengan target

95,00%, telah dan realisasi 97,26% atau capaian 102,37%; (2) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dengan target 95,00%, dan realisasi 100% atau capaian 105,26%; (3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP dengan target sebesar 91,00% dan realisasi 95,32% atau capaian 104,89%; (4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BRMP dengan target 3,60 dan realisasi 3,68 atau capaian 102,33%; serta (5) Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP dengan target 3,26, dan realisasi 3,43 atau capaian 105,07%.

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat BRMP berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir, memiliki pagu total sebesar Rp93.559.782.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp2.000.871.000,00, sehingga pagu efektif sebesar Rp91.558.911.000,00.

Pada 31 Desember 2025, anggaran Sekretariat BRMP telah direalisasikan sebesar Rp90.506.820.705,00 atau sebesar 98,85% dari pagu efektif berdasarkan aplikasi OMSPAN. Realisasi tersebut meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.103.638.848,00 atau sebesar 99,82%, 2) Belanja Barang sebesar Rp81.261.981.857,00 atau sebesar 98,74% dari pagu efektif, dan 3) Belanja Modal sebesar Rp141.200.000,00 atau sebesar 99,62%.

Melalui laporan Kinerja Sekretariat BRMP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026-2029.

AGRO MODERN



AGRO MODERN



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur melalui sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat BRMP merupakan media informasi yang menggambarkan pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian misi organisasi, khususnya pada aspek kesekretariatan lingkup BRMP selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LAKIN Sekretariat BRMP Tahun 2025 mengacu pada Draft Rencana Strategis Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025.

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat BRMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRMP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BRMP menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang Perakitan dan Modernisasi Pertanian, b) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup BRMP, c) koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi,

pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup BRMP, d) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup BRMP, e) koordinasi perencanaan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian serta pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian, f) koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup BRMP, dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup BRMP.

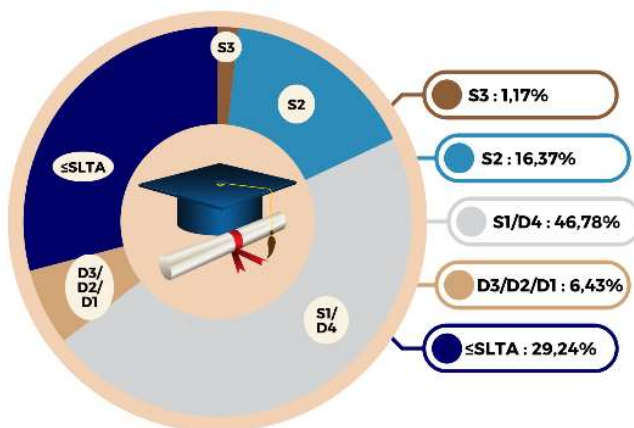
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dan perubahannya melalui Kepmentan Nomor 1369/Kpts/OT.050/M/12/2025, dilakukan penyempurnaan struktur Kelompok Substansi dan Tim Kerja, termasuk pembentukan Kelompok Evaluasi dan Pelaporan. Struktur organisasi Sekretariat BRMP disajikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat BRMP didukung oleh 171 orang pegawai, terdiri atas 108 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 45 PPPK Paruh Waktu dan 9 PPPK Penuh Waktu. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri dari 103 laki-laki (60,23%) dan 68 perempuan (39,76%). Jumlah ini menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 193 orang. Gambaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

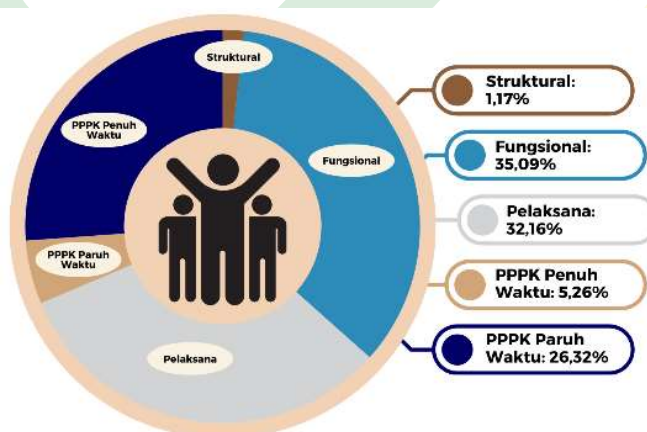
Selama Tahun 2025 terjadi penambahan 65 pegawai yang berasal dari mutasi masuk (7 orang), CPNS (9 orang), PPPK Tahap I (4 orang), dan PPPK Paruh Waktu (45 orang). Sementara itu, terjadi pengurangan 14 pegawai yang terdiri dari purnabakti (5 orang), mutasi keluar (8 orang), dan meninggal dunia (1 orang).

Komposisi SDM secara rinci disajikan pada **Lampiran 2**. Secara umum, pengelolaan SDM Tahun 2025 menunjukkan penurunan jumlah pegawai meskipun terdapat penambahan signifikan melalui PPPK Paruh Waktu. Mayoritas pegawai telah berpendidikan S1, namun proporsi pegawai berpendidikan $\leq$ SLTA masih cukup besar, sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam bentuk penguatan kompetensi, pengelolaan kinerja PPPK, serta penguatan fungsi koordinasi dan perencanaan SDM.

AGRO MODERN



Gambar 1. Komposisi pegawai Sekretariat BRMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2. Komposisi pegawai Sekretariat BRMP Berdasarkan Jabatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BRMP juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sekretariat BRMP memiliki aset berupa tanah seluas 38.630 m² yang terdiri atas tanah perkantoran dan rumah negara. Selain itu, tersedia berbagai sarana penunjang, antara lain 11 unit gedung kantor, 4 unit gedung pertemuan, 9 unit mess/*guest house*, 5 unit rumah negara, 1 unit gedung galeri, 4 unit gedung pos jaga, 3 unit gedung garasi, 2 unit selasar, 1 unit rumah genset, 1 unit bengkel/tempat cuci mobil, 1 unit gedung gudang arsip, 1 unit Laboratorium eks BRMP Hias, 1 unit Laboratorium Kultur Jaringan eks BRMP Hias, 1 unit observatorium/rumah kaca eks BRMP Hias, 1 unit pagar, 5 unit jalan kompleks, 1 unit bangunan pengaman irigasi (turab/pagar), 1 unit embung, 2 unit bak penampung/tower air, serta fasilitas penunjang lainnya berupa gedung papan nama kantor, musala, poliklinik, kantin dan sarana olahraga.

Selain sarana fisik, Sekretariat BRMP juga didukung oleh *Information and Communication Technology-ICT* yang menunjukkan tingkat kesiapan dalam *e-management*, khususnya melalui investasi pada kapasitas data, kekuatan komputasi, dan konektivitas.

Namun terdapat kendala dalam pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat BRMP yaitu besarnya nilai aset yang sudah usang, rusak, atau tidak dapat digunakan, yang saat ini masih dalam proses penghapusan.

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Sekretariat BRMP menghadapi berbagai tantangan strategis dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan utama terletak pada masih terbatasnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan, sehingga kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata. Di sisi lain, pengendalian aset dan Barang Milik Negara belum berjalan optimal, ditandai dengan permasalahan sertifikasi tanah dan penertiban aset yang berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan berulang. Penataan organisasi juga menjadi tantangan, karena pembagian tugas pegawai belum sepenuhnya berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, standardisasi manajemen pelayanan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berkaitan dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang semakin berorientasi pada hasil (*outcome*), mitigasi risiko temuan BPK, serta optimalisasi pengelolaan PNPB.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Sekretariat BRMP memegang peran strategis sebagai penggerak utama Reformasi Birokrasi di lingkungan BRMP. Sekretariat berperan mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memastikan keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, serta mendorong penerapan sistem *reward and punishment* yang adil dan objektif. Sekretariat juga menjadi pusat pengelolaan dan pengembangan SDM melalui penataan jabatan, manajemen talenta, penyederhanaan birokrasi, dan modernisasi proses bisnis. Dalam bidang keuangan dan aset, Sekretariat berperan sebagai penjamin tata kelola melalui penguatan sistem pengendalian intern, penertiban BMN, mitigasi temuan pemeriksaan, serta optimalisasi pengelolaan PNPB. Seiring dengan perkembangan teknologi, Sekretariat BRMP berperan mengintegrasikan sistem informasi manajemen dan *e-management* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja. Seluruh peran tersebut diarahkan untuk memperkuat mutu layanan manajemen, membangun Zona Integritas, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada hasil.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





AGRO MODERN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Draft Rencana Strategis Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Renstra Sekretariat BRMP) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Draft Renstra BRMP Tahun 2025-2029. Pengesahan Renstra Sekretariat BRMP menunggu pengesahan Renstra BRMP sebagai induknya. Sementara itu, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

Dalam Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BRMP dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BRMP. Cascading visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan Sekretariat BRMP disajikan pada Gambar 3.

2.1.1. Program dan Kegiatan

Program utama BRMP pada periode 2025-2029 diarahkan pada dua program utama yaitu 1) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, dan 2) peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Sebagai unit eselon II, Sekretariat BRMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRMP. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan seluruh kegiatan lingkup BRMP.

Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui pengembangan budaya kerja, reformasi birokrasi secara menyeluruh, pengembangan sumber daya (SDM, sarana dan prasarana). Di samping itu, untuk mendorong tercapainya output yang optimal, maka dilakukan pengembangan manajemen teknologi dan sistem informasi, koordinasi dan fasilitasi kerja sama, reformasi perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi lingkup BRMP.

Dalam kerangka penguatan kegiatan penciptaan dan pengembangan perakitan dan modernisasi pertanian yang dapat memberikan alternatif solusi terbaik dalam menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini dan ke depan, Sekretariat BRMP terus melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan berupa dukungan manajemen program, anggaran, pengembangan SDM serta fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan dan pengembangan perakitan dan modernisasi pertanian dan memberikan layanan jasa informasi publik, serta pengembangan jejaring kerjasama.



Gambar 3. Cascading Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sesuai dengan Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029, disajikan pada **Lampiran 3**.

2.1.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja telah dilakukan sejak penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal, indikatornya:
 - a. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - b. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, indikatornya: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, indikatornya: indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
4. Meningkatnya kepuasan Unit Kerja Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, indikatornya: indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP.

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2025, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja yang akan menjadi panduan dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BRMP. Indikator kinerja tersebut telah mengacu kepada sasaran program/kegiatan Sekretariat BRMP.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan yang merepresentasikan komitmen untuk mencapai kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Secara umum, penetapan PK bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan menjadi dasar penilaian keberhasilan pencapaian target.

Mengacu pada Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dukungan manajemen fasilitasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Adapun target pada Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 dan PK tidak terdapat perbedaan pada lima indikator kinerja.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat BRMP telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak empat kali sebagai tindak lanjut atas perubahan organisasi dan pejabat, serta revisi alokasi anggaran yang digambarkan pada Gambar 4. Dokumen PK awal sampai dengan revisi terakhir disajikan pada **Lampiran 4** sampai dengan **Lampiran 7**.



Gambar 4. Perubahan PK Sekretariat BRMP Tahun 2025

Dalam PK revisi terakhir tersebut, Sekretariat BRMP mengampu empat sasaran kegiatan dengan lima indikator kinerja. Sejalan dengan penyesuaian tersebut, terdapat penambahan dua indikator kinerja baru, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP. Selain itu, dilakukan perubahan nomenklatur indikator dari "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRMP" menjadi "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP".

Di sisi lain, beberapa indikator tidak lagi menjadi indikator kinerja Sekretariat BRMP, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Sekretariat BRMP dan Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRMP. Penyesuaian indikator ini mencerminkan

upaya penyelarasan fokus kinerja Sekretariat BRMP dengan kebijakan organisasi serta pembagian peran yang lebih tepat dalam mendukung pencapaian kinerja BRMP secara keseluruhan. PK revisi terakhir selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal	1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %
		2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00 Nilai
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,60 Indeks (1-4)
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	5. Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,26 Indeks (1-4)

AGRO MODERN



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





AGRO MODERN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja Sekretariat BRMP sebagai bagian dari pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang terstruktur serta penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilaksanakan secara konsisten guna menjamin ketercapaian sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin akurasi, konsistensi, dan akuntabilitas data kinerja, penyusunan Lakin Sekretariat BRMP dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut meliputi SOP Pengumpulan Data Kinerja (**Lampiran 8**) dan SOP Penyusunan Lakin (**Lampiran 9**). Seluruh proses tersebut dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP BRMP guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SK Tim Evaluasi AKIP Sekretariat BRMP disajikan pada **Lampiran 10**.

Pemantauan kinerja dilaksanakan secara periodik dan terintegrasi melalui pelaporan perkembangan fisik dan keuangan setiap bulan, serta pemanfaatan berbagai aplikasi pengelolaan dan pemantauan kinerja, antara lain OMSPAN, SAKTI, sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 107 Tahun 2024, e-Monev Bappenas, dan e-SAKIP Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pemantauan ini diperkuat oleh komitmen pimpinan, dukungan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan yang memadai.

Mekanisme pemantauan kinerja dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemantauan bulanan oleh penanggung jawab kegiatan, pemantauan triwulanan oleh unit pengelola kinerja, hingga evaluasi akhir tahun sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Mekanisme ini tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan, risiko, dan kendala pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, pengukuran kinerja Sekretariat BRMP dilakukan dengan membandingkan

antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Sekretariat BRMP secara berkelanjutan berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Pengukuran tersebut didasarkan pada indikator kinerja yang mencakup aspek efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Capaian kinerja setiap sasaran diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat BRMP selama Tahun 2025 dan menjadi dasar bagi penyusunan tindak lanjut perbaikan perencanaan, sekaligus sebagai sarana akuntabilitas kepada pihak internal maupun eksternal mengenai ketercapaian tujuan, misi, dan visi organisasi.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat BRMP menetapkan empat sasaran kegiatan yang diukur melalui lima indikator kinerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat BRMP mencapai sebesar **103,98 persen**, yang termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Capaian tersebut merupakan rata-rata persentase dari seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kategori keberhasilan mengacu pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu capaian di atas 100 persen dikategorikan Sangat Berhasil, capaian 80–100 persen Berhasil, capaian 60–79 persen Cukup Berhasil, dan capaian 0–59 persen Tidak Berhasil.

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan karakteristik targetnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan ke dalam tiga pola, yaitu *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi dibandingkan target maka semakin baik capaian kinerjanya; *minimize*, dimana semakin rendah realisasi dibandingkan target maka semakin baik kinerjanya; dan *stabilize*, dimana capaian kinerja dinilai semakin baik apabila realisasi mendekati target dalam rentang yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian 5 IKSK Sekretariat BRMP diukur menggunakan *maximize* target.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya, yang pengukurannya mengacu pada Draft Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat BRMP yang disajikan pada **Lampiran 11**. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar **103,98%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil** yang dihitung dari rata-rata capaian 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja setiap Sasaran Kegiatan Sekretariat BRMP selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 2. Rencana aksi AKIP Sekretariat BRMP disajikan pada **Lampiran 12**.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal	1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %	97,26 %	102,37 %	Sangat Berhasil
		2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %	100 %	105,26 %	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00 Nilai	95,45 Nilai	104,89 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,60 Indeks (1-4)	3,684 Indeks	102,33 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP	5. Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP	3,26 Indeks (1-4)	3,43	105,07	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Rata-Rata					103,98	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025 seluruh 5 (lima) indikator kinerja memperoleh capaian di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BRMP telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, dimana 4 (empat) indikator kinerja mencapai di atas 100 persen dan 1 (satu) indikator berada di bawah 100 persen dengan capaian rata-rata sebesar 111,51 persen, terlihat adanya penurunan capaian rata-rata. Penurunan ini tidak mencerminkan penurunan kinerja substantif, melainkan dipengaruhi oleh peningkatan target kinerja serta perubahan indikator kinerja pada Tahun 2025.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2025 Sekretariat BRMP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

SASARAN KEGIATAN

Ditindaklanjutnya Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal

Pada tahun 2025, capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan (b) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

1

Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BRMP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai

atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

Selama tahun 2025, BRMP telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan kegiatan meliputi Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Evaluasi SAKIP, Pengawasan SPIP, Reviu BMN, Reviu HPS, Reviu LK, Reviu PIPK, Reviu RKA-KL, dan Tindak Lanjut BPK-RI.

Sesuai dengan draft manual IKS Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029, perhitungan Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP, menggunakan rumus dibawah ini.

$$TL = \frac{TLt}{R(t-1)} \times 100\%$$

TL : Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti BRMP terhadap total rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

TLt : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (t-1)

R(t-1) : Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (t-1)

Berdasarkan hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal (Itjen) pada BRMP Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 3, tercatat sebanyak 1.646 rekomendasi, yang terdiri atas 1.399 rekomendasi administrasi dan 247 rekomendasi Kerugian Negara. Sampai dengan Desember 2025, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.601 rekomendasi, yang mencakup 1.354 rekomendasi administrasi dan 247 rekomendasi Kerugian Negara. Dengan demikian, masih terdapat 45 rekomendasi hasil audit Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti. Rincian Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 13**.

Tabel 3. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Intern Itjen Tahun 2024 Lingkup BRMP

Uraian	Jumlah LHP	Rekomendasi			Tindak Lanjut		
		Adm	KN	Total	Adm	KN	Total
Audit Ketaatan	4	83	36	119	64	36	100
Audit Kinerja	24	653	211	864	638	211	849
Evaluasi SAKIP	1	13	0	13	13	0	13
Pengawasan SPIP	17	106	0	106	100	0	100
Reviu BMN	2	36	0	36	35	0	35

Uraian	Jumlah LHP	Rekomendasi			Tindak Lanjut		
		Adm	KN	Total	Adm	KN	Total
Reviu HPS	1	7	0	7	4	0	4
Reviu LK	5	283	0	283	282	0	282
Reviu PIPK	1	7	0	7	7	0	7
Reviu RKA-KL	5	202	0	202	202	0	202
TL BPK RI	2	2	0	2	2	0	2
Total	63	1399	247	1646	1354	247	1601

Keterangan: Adm: Administrasi; KN: Kerugian Negara

Pada Tahun 2025, target indikator kinerja Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP ditetapkan sebesar 95,00 persen, dan sampai dengan Desember 2025 telah terealisasi sebesar 97,26 persen, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 TL &= \frac{TLt}{R(t-1)} \times 100\% \\
 &= \frac{1601}{1646} \times 100\% \\
 &= 97,26\%
 \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja 1 disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan realisasi indikator kinerja tersebut, capaian kinerja BRMP pada indikator 1 dapat dikategorikan dalam kategori **Sangat Berhasil**. Perbandingan capaian Indikator Kinerja 1 antar tahun tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Tahun 2023 dan 2024 menggunakan indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%).

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00	97,26	102,38

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 terhadap target jangka menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 5. Dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 97,00 persen, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 100,27 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya konsistensi pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya guna menjaga keberlanjutan pencapaian target jangka menengah.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 Terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	% terhadap target 2029
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)	T	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,00
	R	97,26	-	-	-	-	97,26
	%	102,38					100,27

Keterangan: T: target; R: realisasi, %: persentase

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP diantaranya:

1. Seluruh rekomendasi temuan Kerugian Negara telah ditindak lanjuti oleh satker lingkup BRMP, dan
2. Satker menindaklanjuti temuan administrasi walaupun belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya:

1. Keterlambatan penerimaan LHP atau Buku Merah dari Inspektorat Jenderal,
2. Satker tidak secara langsung melengkapi seluruh tanggapan beserta evidencinya sesuai rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan satker terkait agar dapat menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan
2. Melakukan koordinasi dengan satker dan Tim Itjen apabila ada permasalahan terkait temuan.



Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BRMP

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan Kementerian Pertanian khususnya BRMP pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja BRMP. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana selalu dilakukan audit oleh BPK RI maupun

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memastikan akurasi data dan mewujudkan laporan keuangan yang handal, akuntabel, transparan untuk mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BRMP sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi LHP BPK.

BPK memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan draft manual IKS Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029, perhitungan Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, menggunakan rumus dibawah ini.

$$TLBPK = \frac{TLBPKt}{RBPK(t-1)} \times 100\%$$

TLBPK : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

TLBPKt : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (t-1)

RBPK(t-1) : Jumlah rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya (t-1)

Berdasarkan hasil inventarisasi temuan BPK pada BRMP Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 6, tercatat sebanyak 15 rekomendasi. Dimana seluruhnya telah ditindaklanjuti dan menunggu telaah BPK. Rincian Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil LHP BPK Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 14**.

Tabel 6. Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024

LHP	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut		%	UTL
		Sesuai	Belum Sesuai		
Laporan Keuangan Tahun 2023	19	17	2	100	19

Pada Tahun 2025, target indikator kinerja 2 ditetapkan sebesar 95,00 persen, dan sampai dengan Desember 2025 telah terealisasi sebesar 100 persen,

dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 TLBPk &= \frac{TLBPk_t}{RBPk(t-1)} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{95} \times 100\% \\
 &= 105,26\%
 \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja 2 disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan realisasi indikator kinerja tersebut, capaian kinerja BRMP pada indikator 2 dapat dikategorikan dalam kategori **Sangat Berhasil**. Perbandingan capaian Indikator Kinerja 2 antar tahun tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Tahun 2023 dan 2024 menggunakan indikator Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%).

Tabel 7. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00	100,00	105,26

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja 2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 97,00 persen, realisasi tahun 2025 mencapai 100,00 persen sehingga capaian sebesar 103,09 persen. Capaian ini menunjukkan telah memenuhi dan melampaui target jangka menengah, namun Sekretariat BRMP tetap harus mempertahankan kinerja secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 terhadap Target Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	% terhadap target 2029
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)	T	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,00
	R	100,00	-	-	-	-	100,00
		105,26					103,09

Keterangan: T: target; R: realisasi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait BRMP dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Komitmen pimpinan di seluruh unit kerja lingkup BRMP dalam pengelolaan dan penertiban aset lingkup BRMP.
2. Koordinasi yang efektif disertai pengawalan tindak lanjut rekomendasi BPK yang dilakukan secara optimal.
3. Kapasitas satuan kerja lingkup BRMP dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada BRMP, antara lain:

1. Kurangnya responsivitas sebagian satker dalam menindaklanjuti rekomendasi, sehingga penyampaian data dukung tindak lanjut melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Kompleksitas penyelesaian rekomendasi yang relatif sulit ditindaklanjuti oleh satker.
3. Permasalahan penertiban dan penyelesaian aset, yang memerlukan waktu serta koordinasi lintas pihak lebih panjang dibandingkan dengan jenis temuan lainnya.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, BRMP telah melakukan beberapa langkah perbaikan, diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan satker agar penyampaian data dukung tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal dan BPK terhadap rekomendasi yang mengalami kendala atau memerlukan penanganan khusus.

2

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada tahun 2025, capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran IKPA meliputi aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator: a) Revisi DIPA, b) Deviasi Halaman III DIPA, c) Penyerapan anggaran, d) Belanja kontraktual, e) Penyelesaian tagihan, f) Pengelolaan UP dan TUP, dan g) Capaian *output*.

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2025, Nilai IKPA Triwulan 1 secara keseluruhan adalah 100, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian data dan perhitungan penilaian (berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPb Kemenkeu No ND-163/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025).

Pada PK Revisi Terakhir, terdapat perubahan indikator PK dari Nilai IKPA Sekretariat BRMP menjadi Nilai IKPA BRMP. Perubahan ini merujuk pada terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Nilai IKPA menjadi parameter atas penilaian kinerja penganggaran berbasis kinerja dalam satu tahun anggaran.

Capaian kinerja Sekretariat BRMP telah melampaui dengan target yang ditetapkan, dimana capaian Nilai IKPA BRMP Tahun 2025 yaitu 95,45 atau 104,89% dari target 91,00 (Nilai). Berdasarkan data tersebut, Nilai IKPA BRMP dapat dikategorikan ke dalam kategori **Sangat Berhasil**. Pencapaian target indikator kinerja 3 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00	95,45	104,89

Capaian nilai IKPA BRMP berasal dari nilai IKPA masing-masing satker lingkup BRMP yang disajikan pada **Lampiran 15**. Secara umum, capaian kinerja IKPA lingkup BRMP telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh dari nilai IKPA pada aplikasi Omspan Kementerian Keuangan. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2025 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 Periode Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja		2023	2024	2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	T	-	90,82	-
	R	90,84	95,53	-
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	T	-	-	91,00
	R	-	-	95,45
%		-	105,19	104,89

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

Berdasarkan Tabel 10, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menunjukkan tren kinerja yang konsisten pada periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi indikator tercatat sebesar 90,84 persen. Meskipun nilai IKPA BSIP pada tahun 2023 tersedia, indikator tersebut tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja BSIP, sehingga tidak memiliki target kinerja pada tahun dimaksud. Adapun indikator yang digunakan dalam PK BRMP Tahun 2023 adalah Nilai Kinerja Anggaran BSIP.

Pada tahun 2024, Nilai IKPA menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan Indikator Nilai IKPA sebagai IKU pada PK BRMP Tahun 2024, sehingga pelaksanaannya dipantau dan dikendalikan lebih ketat sepanjang tahun 2024. Realisasi indikator mencapai 95,53 persen dengan target sebesar 90,82 persen, sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 105,19 persen. Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran yang dilakukan oleh unit kerja lingkup BRMP.

Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan kelembagaan menjadi BRMP, dengan target sebesar 91,00 persen dan realisasi mencapai 95,45 persen. Rasio capaian sebesar 104,89 persen menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian kelembagaan, kinerja pelaksanaan anggaran tetap terjaga secara

optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian administrasi sehingga memerlukan permintaan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), yang berdampak pada pengurang Nilai IKPA. Nilai IKPA BRMP Tahun 2025 disajikan pada Gambar 5 yang bersumber dari Aplikasi OMSPAN per 24 Januari 2025, dan memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja anggaran BRMP.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01809	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nilai	99.69	87.97	97.46	89.33	99.54	96.74	99.92	96.20	100%	0.75	95.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.97	13.20	19.49	8.93	9.95	9.67	24.96				
			Nilai Aspek	93.83			95.77			99.92				

Keterangan: Aplikasi OMSPAN tanggal 24 Januari 2025

Gambar 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Tahun 2025

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja 3 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 93,00, realisasi tahun 2025 mencapai 95,45 sehingga capaian sebesar 102,63 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa IKPA BRMP telah memenuhi dan melampaui target jangka menengah, namun Sekretariat BRMP tetap harus mempertahankan kinerja secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 terhadap Target Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	% terhadap target 2029
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	T	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,00
	R	95,45	-	-	-	-	95,45
	%	104,89	-	-	-	-	102,63

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Kualitas perencanaan anggaran yang sangat baik, tercermin dari nilai Revisi DIPA sebesar 99,69 dan Deviasi Halaman III DIPA sebesar 87,97, yang menunjukkan perencanaan kegiatan relatif stabil dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan.
2. Penyerapan anggaran yang optimal, dengan nilai 97,46, yang mencerminkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.
3. Kinerja penyelesaian tagihan yang tinggi, dengan nilai 99,54, serta pengelolaan UP dan TUP yang tertib dengan nilai 96,74, menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan.
4. Capaian output yang sangat optimal, tercermin dari nilai 99,92, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran telah mendukung pencapaian output kegiatan secara efektif.

Namun demikian, keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Nilai belanja kontraktual sebesar 89,33, yang menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis kontrak.
2. Deviasi Halaman III DIPA yang belum sepenuhnya optimal, mencerminkan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.
3. Adanya dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 0,75 sebagai faktor pengurang, yang berdampak pada penurunan nilai akhir IKPA menjadi 95,45.

Solusi antisipasi terus dilakukan untuk memitigasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ke depan baik dengan:

1. Penguatan perencanaan kegiatan kontraktual sejak awal tahun anggaran guna meningkatkan nilai belanja kontraktual.
2. Penyempurnaan penjadwalan kegiatan dan pembayaran, untuk meminimalkan deviasi Halaman III DIPA serta menghindari kebutuhan dispensasi SPM.
3. Monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala pada seluruh indikator, sehingga potensi penurunan nilai dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini.
4. Peningkatan koordinasi antara unit teknis dan pengelola keuangan, khususnya dalam percepatan penyelesaian administrasi dan pembayaran.

3

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada tahun 2025, capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan pengguna layanan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Indikator ini menggambarkan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, meliputi prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta kualitas hasil layanan.

Sasaran pengukuran IKM adalah untuk menggambarkan tingkat peningkatan kualitas, kenyamanan, kemudahan, serta keandalan layanan publik yang diberikan oleh BRMP berdasarkan persepsi pengguna layanan. Sasaran ini mencerminkan komitmen BRMP dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, percepatan proses layanan, peningkatan responsivitas, serta pemenuhan harapan masyarakat terhadap mutu layanan yang diterima. Sesuai dengan Manual IKSK Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029, perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata hasil survei IKM dari seluruh satuan kerja lingkup BRMP.

Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas layanan publik BRMP berdasarkan penilaian langsung dari penerima layanan. Hasil pengukuran menjadi dasar dalam peningkatan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan responsivitas, serta perbaikan sarana dan prasarana layanan. Selain itu, indikator ini memastikan bahwa pelayanan BRMP dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui kuesioner manual dan daring yang disebarkan kepada pengguna layanan. Instrumen survei mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan mencakup 9 unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

Survei dilaksanakan secara periodik selama satu tahun, dengan periode pengumpulan data pada 1 Januari–26 Oktober 2025, dan proses penyusunan indeks selama tiga bulan. Penentuan jumlah responden mengikuti ketentuan PermenPANRB, dengan total 17.509 responden yang tersebar di seluruh unit kerja/unit penyelenggara pelayanan (UK/UPP) lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hasil Pelaksanaan SKM OPP (Organisasi Penyelenggara Pelayanan) Lingkup BRMP disajikan pada **Lampiran 16**. Nilai kesembilan unsur SKM Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Nilai Kesembilan Unsur SKM Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025

No	Unsur	Nilai	Kategori	Nilai IKM
1	Persyaratan	91,51	A	92,10
2	Prosedur	91,05	A	
3	Waktu	90,83	A	
4	Biaya	93,32	A	
5	Produk	90,70	A	
6	Kompetensi	92,13	A	
7	Perilaku	93,23	A	
8	Aduan	93,77	A	
9	Sarana Prasarana	92,35	A	

Berdasarkan Tabel 12, Nilai Kesembilan Unsur SKM Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 memperoleh kategori A dengan nilai berada pada rentang 90,70–93,77. Nilai tertinggi terdapat pada unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan (93,77), sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan (90,70). Rata-rata nilai dari kesembilan unsur pelayanan menghasilkan Nilai IKM sebesar 92,10. Konversi nilai IKM ke dalam skala indeks 4 dilakukan dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Nilai IKM}}{100} \times 4$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{Indeks} = \frac{92,10}{100} \times 4$$

$$\text{Indeks} = 3,68$$

Dengan demikian, Nilai IKM sebesar 92,10 setara dengan Indeks Pelayanan 3,68 pada skala 1–4. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target indeks yang ditetapkan adalah 3,60, sedangkan realisasi sebesar 3,68 sehingga capaiannya sebesar 102,33. Pencapaian target indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada Tabel 13. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dikategorikan ke dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,60	3,68	102,33

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan indikator baru di Sekretariat BRMP, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dibandingkan antar tahun. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 14. Realisasi Indikator Kinerja 4 sebesar 3,68 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 3,78, capaian baru mencapai 97,35 persen sehingga masih diperlukan peningkatan kinerja secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	% terhadap target 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks 1-4)	T	3,60	3,65	3,69	3,74	3,78	3,78
	R	3,68	-	-	-	-	3,68
	%	102,33	-	-	-	-	97,35

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dengan realisasi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan konsisten, sehingga persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu layanan dapat dipahami dan dipenuhi dengan baik oleh pengguna layanan.

2. Kompetensi dan perilaku petugas layanan yang profesional, yang tercermin dari sikap responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.
3. Penguatan sistem pengaduan dan keterbukaan informasi, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, saran, dan masukan serta memperoleh tindak lanjut secara cepat dan transparan.

Beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, diantaranya adalah:

1. Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi BRMP menyebabkan penyesuaian pada jenis, spesifikasi, dan standar layanan, sehingga sebagian pengguna masih memerlukan adaptasi terhadap produk dan prosedur layanan yang baru.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di beberapa UK/UPP berdampak pada peningkatan beban kerja petugas, keterlambatan penyelesaian layanan, serta belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Sistem, prosedur, dan penyebarluasan informasi layanan pada sebagian unit masih perlu disempurnakan, sehingga belum seluruh pengguna memperoleh informasi yang lengkap dan seragam mengenai persyaratan, waktu, dan mekanisme pelayanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Penyempurnaan standar dan prosedur layanan, melalui evaluasi dan penyesuaian SOP serta pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk memastikan standar pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP pasca perubahan nomenklatur.
2. Penguatan kapasitas dan profesionalisme petugas layanan, melalui pelatihan, pembinaan, serta sosialisasi 9 unsur SKM guna meningkatkan kompetensi teknis dan sikap pelayanan aparatur.
3. Peningkatan keterbukaan dan akses informasi layanan, dengan pemutakhiran informasi layanan pada media sosial dan website, serta penguatan kanal pengaduan dan umpan balik pengguna layanan.

4

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada tahun 2025, capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.



Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Indikator Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP merupakan indikator kinerja utama pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP sebagaimana tercantum dalam Draft Renstra Sekretariat BRMP 2025–2029 dan Manual IKS Sekretariat BRMP. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan unit eselon II lingkup BRMP terhadap kualitas layanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat BRMP, yang meliputi layanan perencanaan dan anggaran, keuangan dan BMN, kepegawaian, hukum dan kerja sama, kehumasan dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan, serta layanan umum dan rumah tangga.

Pengukuran indeks dilakukan melalui Survei Kepuasan Unit Eselon II yang diikuti oleh 99 responden dari unit-unit eselon II lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai pengguna langsung layanan Sekretariat BRMP. Setiap responden memberikan penilaian terhadap delapan unsur pelayanan, yaitu kesesuaian persyaratan layanan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta kualitas sarana dan prasarana.

Hasil pengukuran indeks kepuasan ini menjadi cerminan efektivitas fungsi Sekretariat BRMP sebagai pusat layanan manajerial dan administratif bagi seluruh unit eselon II di lingkungan BRMP. Tingginya tingkat kepuasan menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil survei juga berfungsi sebagai instrumen umpan balik untuk mengidentifikasi aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan. Penilaian menggunakan skala Likert 1–4, yaitu sangat tidak puas (1), tidak puas (2), puas (3), dan sangat puas (4). Survei Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP Tahun 2025 diikuti oleh 99 responden yang berasal dari unit-unit eselon II di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hasil perhitungan indeks tiap unsur disajikan pada Tabel 15. Rincian hasil survei kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP disajikan pada **Lampiran 17**.

Tabel 15. Nilai Unsur Survei Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP Tahun 2025

No	Unsur Survei Kepuasan Eselon II	Indeks
1	Persyaratan layanan	3,37
2	Prosedur pelayanan	3,43
3	Kecepatan pelayanan	3,35

No	Unsur Survei Kepuasan Eselon II	Indeks
4	Kesesuaian produk layanan	3,40
5	Kompetensi petugas	3,43
6	Perilaku petugas	3,58
7	Penanganan pengaduan	3,38
8	Sarana dan prasarana	3,44
Rata-rata		3,43

Hasil pengukuran per unsur menunjukkan bahwa seluruh aspek layanan memperoleh nilai di atas 3,30, yang berada pada kategori puas. Unsur dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas dengan indeks sebesar 3,58, yang mencerminkan bahwa aparatur Sekretariat BRMP dinilai ramah, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen.

Selain itu, unsur kompetensi petugas dan prosedur pelayanan masing-masing memperoleh nilai 3,43, yang mengindikasikan bahwa unit-unit eselon II menilai aparatur Sekretariat BRMP memiliki kemampuan yang memadai serta didukung oleh mekanisme pelayanan yang jelas dan mudah diikuti. Unsur sarana dan prasarana juga memperoleh nilai yang tinggi, yaitu 3,44, yang menunjukkan bahwa fasilitas pendukung layanan telah mampu menunjang kelancaran proses pelayanan administrasi dan manajerial.

Meskipun demikian, beberapa unsur memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu kecepatan pelayanan (3,35), persyaratan layanan (3,37), dan penanganan pengaduan (3,38). Walaupun seluruh masih berada dalam kategori puas, hasil ini memberikan sinyal bahwa terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam penyederhanaan persyaratan administrasi, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta penguatan mekanisme penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Hal ini menjadi masukan penting bagi Sekretariat BRMP dalam upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sebagai indikator baru dalam Draft Renstra Sekretariat BRMP 2025–2029, capaian Indeks Kepuasan sebesar 3,43 menunjukkan bahwa Sekretariat BRMP telah berhasil menjalankan perannya sebagai pusat layanan dukungan manajerial dan administratif bagi seluruh unit eselon II. Tingginya tingkat kepuasan pengguna mencerminkan bahwa layanan perencanaan dan anggaran, keuangan dan BMN, kepegawaian, hukum dan kerja sama, kehumasan dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan, serta layanan umum dan rumah tangga telah berjalan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Unit Eselon II Tahun 2025, diperoleh nilai

Indeks Kepuasan sebesar 3,43 pada skala 1–4. Dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,26, maka capaian indikator ini mencapai 105,07 persen, yang termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP telah melampaui standar kinerja yang ditetapkan dan dinilai baik oleh para pengguna layanan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP	3,26	3,43	105,07

Indikator Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP merupakan indikator baru di Sekretariat BRMP, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dibandingkan antar tahun.

Indikator Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP merupakan indikator baru di Sekretariat BRMP, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dibandingkan antar tahun. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 17. Indikator Kinerja 5 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 3,34, realisasi tahun 2025 mencapai 3,43 sehingga capaian sebesar 102,69 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa Indikator 5 telah memenuhi dan melampaui target jangka menengah, namun Sekretariat BRMP tetap harus mempertahankan kinerja secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 terhadap Target Jangka Menengah Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	% thd target 2029
Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP	T 3,26	3,28	3,3	3,32	3,34	3,34
	R 3,43	-	-	-	-	3,43
	% 105,07	-	-	-	-	102,69

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

AGRO MODERN

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Kualitas sumber daya manusia Sekretariat BRMP menjadi faktor dominan dalam mendorong kepuasan pengguna layanan,
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik fisik maupun berbasis sistem. Fasilitas kerja, sistem informasi, dan media layanan yang disediakan Sekretariat BRMP telah mampu menunjang kelancaran proses pelayanan.
3. Komitmen pimpinan dan budaya pelayanan yang kuat di lingkungan Sekretariat BRMP. Keterlibatan pimpinan dalam pengawalan pelaksanaan tugas, pemberian arahan, serta pengendalian mutu layanan mendorong aparatur untuk memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel kepada unit-unit eselon II.

Namun demikian, keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Kompleksitas proses administrasi, khususnya yang terkait dengan regulasi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian yang harus mematuhi berbagai ketentuan lintas kementerian/lembaga.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada waktu-waktu tertentu, terutama pada periode beban kerja tinggi (penyusunan anggaran, pelaporan kinerja, penutupan tahun anggaran).
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan pengaduan dan umpan balik, sehingga tidak seluruh masukan pengguna dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terstruktur.

Solusi antisipasi terus dilakukan untuk memitigasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ke depan baik dengan:

1. Penyederhanaan dan standarisasi layanan, melalui penyusunan dan pemutakhiran SOP layanan dukungan manajemen agar persyaratan lebih jelas, ringkas, dan mudah dipenuhi oleh unit eselon II.
2. Peningkatan kompetensi aparatur, melalui pembinaan, bimbingan teknis, serta pembelajaran berbasis praktik agar petugas layanan semakin profesional dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi layanan, khususnya dalam layanan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, guna mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada dokumen manual.
4. Penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik, baik melalui media elektronik maupun forum koordinasi, sehingga setiap keluhan dan masukan dari unit eselon II dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan transparan.

5. Penguatan koordinasi internal dan lintas unit, untuk memastikan bahwa setiap permintaan layanan dapat diselesaikan secara terpadu dan tidak terhambat oleh sekat-sekat birokrasi.

3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam regulasi tersebut, Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu volume keluaran dan menjadi bagian dari Standar Biaya, yang meliputi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Struktur Biaya (SSB).

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam PMK tersebut adalah efisiensi penggunaan anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025, terdapat delapan Rincian Output (RO) di Sekretariat BRMP yang wajib menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU), yaitu RO Layanan BMN, RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, RO Layanan Manajemen SDM, RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan, RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, RO Layanan Manajemen Keuangan, dan RO Layanan Reformasi Kinerja.

Berdasarkan hasil monitoring penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana disajikan pada Tabel 18, realisasi anggaran dan kesesuaian dengan indeks SBKU pada masing-masing Rincian Output (RO) di Sekretariat BRMP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RO Layanan BMN menggunakan SBKU dengan indeks sebesar Rp480.000.000 per layanan. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp479.345.746 dengan realisasi volume keluaran (RVRO) sebanyak 1 layanan, sehingga nilai realisasi anggaran per output sebesar Rp479.345.746. Dengan demikian, RO ini telah menggunakan SBKU secara konsisten.
2. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi memiliki indeks SBKU sebesar Rp458.000.000 per layanan. Realisasi anggaran mencapai Rp448.734.312 dengan RVRO sebanyak 1 layanan, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp448.734.312. RO ini juga telah mengacu pada SBKU yang ditetapkan.
3. RO Layanan Manajemen SDM ditetapkan dengan indeks SBKU sebesar Rp2.800.000 per orang. Realisasi anggaran sebesar Rp2.363.655.631

dengan RVRO sebanyak 2.908 orang, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp812.811. RO ini dinilai telah menggunakan SBKU, meskipun terdapat efisiensi biaya per unit keluaran.

4. RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan memiliki indeks SBKU sebesar Rp30.261.000 per orang. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.025.263.888 dengan RVRO sebanyak 26 orang, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp39.433.226. Nilai ini melebihi indeks SBKU, sehingga RO ini dinyatakan belum mengacu pada SBKU.
5. RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran ditetapkan dengan indeks SBKU sebesar Rp810.400.000 per dokumen. Realisasi anggaran mencapai Rp4.297.322.235 dengan RVRO sebanyak 5 dokumen, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp859.464.447. Nilai tersebut melampaui indeks SBKU, sehingga RO ini belum menggunakan SBKU secara konsisten.
6. RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi memiliki indeks SBKU sebesar Rp240.000.000 per dokumen. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2.104.779.331 dengan RVRO sebanyak 11 dokumen, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp191.343.575. RO ini telah menggunakan SBKU dan menunjukkan efisiensi biaya.
7. RO Layanan Manajemen Keuangan ditetapkan dengan indeks SBKU sebesar Rp508.000.000 per dokumen. Realisasi anggaran mencapai Rp1.544.560.955 dengan RVRO sebanyak 3 dokumen, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp514.853.651. Nilai ini sedikit melebihi indeks SBKU, sehingga RO ini dikategorikan belum mengacu pada SBKU.
8. RO Layanan Reformasi Kinerja memiliki indeks SBKU sebesar Rp211.000.000 per layanan. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp414.721.097 dengan RVRO sebanyak 1 layanan, sehingga realisasi anggaran per output sebesar Rp414.721.097. Nilai tersebut jauh di atas indeks SBKU, sehingga RO ini belum menggunakan SBKU.

Secara umum, dari delapan RO yang dilaksanakan oleh Sekretariat BRMP, terdapat empat RO yang telah menggunakan SBKU secara konsisten, sementara empat RO lainnya masih belum sesuai dengan indeks SBKU yang ditetapkan. Efisiensi SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025 disajikan pada Tabel 19. Berdasarkan aplikasi monev kemenkeu, efisiensi per RO dapat diuraikan sebagai berikut:

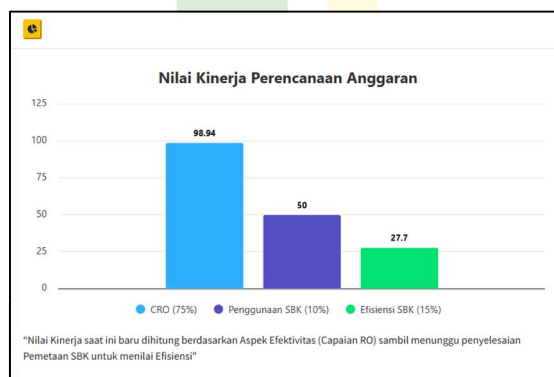
1. RO Layanan BMN memiliki indeks SBKU sebesar Rp480.000.000 dengan realisasi anggaran Rp479.345.746 untuk 1 layanan. Selisih sebesar Rp654.254 menghasilkan tingkat efisiensi 0,14 persen, dan seluruh nilai efisiensi tersebut diperhitungkan.
2. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi ditetapkan dengan indeks SBKU sebesar Rp458.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp448.734.312 untuk 1 layanan. Selisih anggaran mencapai Rp9.265.688,

sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 2,02 persen, yang sepenuhnya diperhitungkan.

3. RO Layanan Manajemen SDM memiliki indeks SBKU sebesar Rp2.800.000 per orang. Dengan target volume keluaran (TVRO) sebesar 3.501 orang dan realisasi volume keluaran (RVRO) sebesar 2.908 orang, realisasi anggaran tercatat Rp2.363.655.631 atau sebesar Rp812.811 per orang. Meskipun tingkat efisiensi secara matematis mencapai 70,97 persen, RO ini tidak diperhitungkan dalam nilai efisiensi (0 persen) karena tidak mencapai target volume keluaran yang ditetapkan ($RVRO < TVRO$).
4. RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi memiliki indeks SBKU sebesar Rp240.000.000 per dokumen. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.104.779.331 untuk 11 dokumen, diperoleh realisasi anggaran per output sebesar Rp191.343.575. Selisih terhadap indeks SBKU mencapai Rp48.656.425, menghasilkan tingkat efisiensi 20,27 persen. Sesuai ketentuan, nilai efisiensi yang diperhitungkan dibatasi maksimal 20 persen, karena realisasi anggaran berada lebih dari 20 persen di bawah indeks SBKU.

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Perubahan Pedoman Terknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AF/2025, variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40 persen dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60 persen.

Berdasarkan data aplikasi monev kemenkeu per 24 Januari 2026 yang disajikan pada Gambar 6, Nilai penggunaan SBK Sekretariat BRMP adalah 50 persen. Sedangkan efisiensi SBK sebesar 27,7 persen. Dengan demikian Nilai Efisiensi Sekretariat BRMP berdasarkan SBK sebesar 36,62.



Gambar 6. Nilai Efisiensi SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025

Tabel 18. Monitoring Penggunaan SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran 9 = 7/8	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/8	10
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	479.345.746	1	479.345.746	Ya
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	448.734.312	1	448.734.312	Ya
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L tanpa satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) [Orang]	2.800.000	2.363.655.631	2.908,00	812.811	Ya
4	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	SBKU	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama [Orang]	30.261.000	1.025.263.888	26	39.433.226	Tidak
5	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	SBKU	Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker diatas 40 Satker [Dokumen]	810.400.000	4.297.322.235	5	859.464.447	Tidak
6	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	2.104.779.331	11	191.343.575	Ya
7	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]	508.000.000	1.544.560.955	3	514.853.651	Tidak
8	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja (Layanan)	SBKU	Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Eselon I/Setingkat [Dokumen]	211.000.000	414.721.097	1	414.721.097	Tidak

Tabel 19. Efisiensi SBK Sekretariat BRMP Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7/9	11 = 6-10	12 = 11/6	13	14
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	479.345.746	1	1	479.345.746	654.254	0,14	0,14	-
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	448.734.312	1	1	448.734.312	9.265.688	2,02	2,02	-
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L tanpa satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) [Orang]	2.800.000	2.363.655.631	3.501,00	2.908,00	812.811	1.987.189	70,97	0	Tidak diperhitungkan (0%). RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).
4	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	2.104.779.331	11	11	191.343.575	48.656.425	20,27	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Sekretariat BRMP, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sistem kerja, dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor kunci yang berperan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan, yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif pimpinan dalam memberikan arahan strategis, melakukan pengendalian, serta memastikan seluruh unit kerja menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana dan target kinerja.
2. Perencanaan yang berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Sekretariat BRMP, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap capaian kinerja.
3. Penerapan efisiensi dan efektivitas anggaran, melalui pengendalian belanja dan optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian target output yang telah ditetapkan.
4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya, guna memastikan aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan, baik dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak terkait lainnya, untuk meningkatkan sinergi, kualitas layanan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Penyempurnaan tata kelola perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pemantauan kinerja, melalui evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap realisasi output dan indikator kinerja, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan dilakukan langkah-langkah perbaikan guna mencapai target kinerja, termasuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), secara optimal.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai kerangka utama pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah, kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur. Untuk mempercepat pencapaian sasaran tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai wujud konkret penerapan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja.

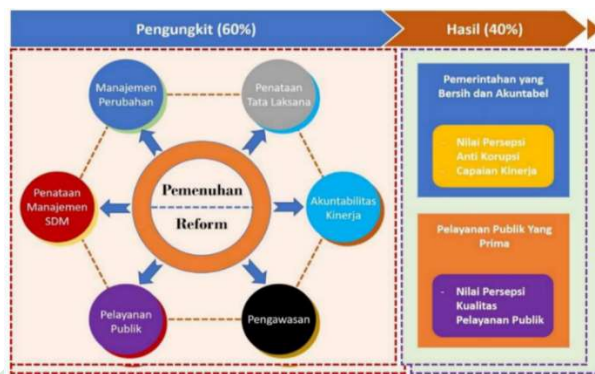
Pembangunan Zona Integritas bertujuan membentuk budaya birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, dengan menekankan komitmen pimpinan dan jajaran. Implementasi ZI difokuskan pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM dipilih berdasarkan tingkat strategis pelayanan, besaran pengelolaan sumber daya, dan keberhasilan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BRMP melalui Keputusan Nomor 829/KPTS/OT.050/H.1/07/2025. Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri melalui mekanisme penilaian silang antar unit kerja. Evaluasi pembangunan Zona Integritas mencakup komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil sebesar 40 persen, yang menggambarkan tingkat penerapan reformasi birokrasi serta capaian birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri yang terdiri dari Ketua Kelompok, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Tata Usaha Lingkup BRMP. Tim Penilai Mandiri tersebut melakukan penilaian silang antar UK/UPT.

Penilaian Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot sebesar 60 persen dari penilaian, terdiri dari aspek pemenuhan (30 persen) dan aspek *reform* (30 persen), yaitu pada area (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tatalaksana, (3) Penataan Sistem Manajemen SDM, (4) Penguatan Akuntabilitas, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil memiliki bobot sebesar 40 persen dari penilaian, yang terdiri atas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5 persen) dan Pelayanan Publik yang Prima (17,5 persen). Di bawah ini adalah gambar yang

menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen (Gambar 7).



Sumber: Permenpan RB Nomor 90, 2021.

Gambar 7. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pada Tahun 2025, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tidak lagi menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan. Meskipun demikian, capaian kinerja Sekretariat BRMP dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap dilaksanakan, sedangkan hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM per area di lingkungan Sekretariat BRMP Tahun 2025 disajikan pada Tabel 20.

Berdasarkan hasil penilaian silang yang telah dilakukan serta terbitnya Surat Keputusan Kepala BRMP Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Lingkup BRMP Tahun 2025 (**Lampiran 18**), Sekretariat BRMP sebagai unit eselon II memperoleh nilai pembangunan Zona Integritas sebesar 86,09.

Keberhasilan pembangunan ZI tidak terlepas dari kinerja dari Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat BRMP.

Tabel 20. Hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM per Area Sekretariat BRMP Tahun 2025

No.	Area Perubahan	Bobot	Hasil Penilaian
KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)		60,00	50,31
1.	Manajemen Perubahan	8,00	6,97
2.	Penataan Tatalaksana	7,00	4,81
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	8,50
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10,00	8,09

No.	Area Perubahan	Bobot	Hasil Penilaian
5.	Penguatan Pengawasan	15,00	13,42
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,53
KOMPONEN HASIL		40,00	35,79
1.	Birokrasi yang Bersih dan Bebas	22,50	19,98
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,79
NILAI TOTAL		100,00	86,09

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BRMP Tahun 2025 per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp93.559.782.000,00. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp9.120.491.000,00, Belanja Barang sebesar Rp84.297.556.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp141.735.000,00. Seluruh anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, melalui Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Rincian Output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut meliputi: (1) Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, (2) Layanan Kerjasama, (3) Layanan BMN, (4) Layanan Hukum, (5) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, (6) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, (7) Layanan Umum, (8) Layanan Data dan Informasi, (9) Layanan Perkantoran, (10) Layanan Manajemen SDM, (11) Layanan Pendidikan dan Pelatihan, (12) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (13) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, (14) Layanan Manajemen Keuangan, (15) Layanan Reformasi Kinerja, dan (16) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat BRMP mengalami blokir anggaran sebesar Rp2.000.871.000,00. Blokir tersebut terdiri atas blokir akibat kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.750.871.000,00 serta blokir karena belum terpenuhinya dasar hukum pengalokasian (*clearance*) untuk belanja jasa lainnya sebesar Rp250.000.000,00. Dengan adanya blokir tersebut, pagu efektif Sekretariat BRMP Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp91.558.911.000,00. Informasi mengenai pagu total dan pagu efektif Sekretariat BRMP TA 2025 disajikan pada Tabel 21.

Selama Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan 19 (sembilan belas) kali revisi DIPA. Revisi tersebut antara lain disebabkan oleh pencantuman dan/atau penghapusan blokir kebijakan efisiensi, penambahan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realokasi antar satuan kerja dan perubahan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

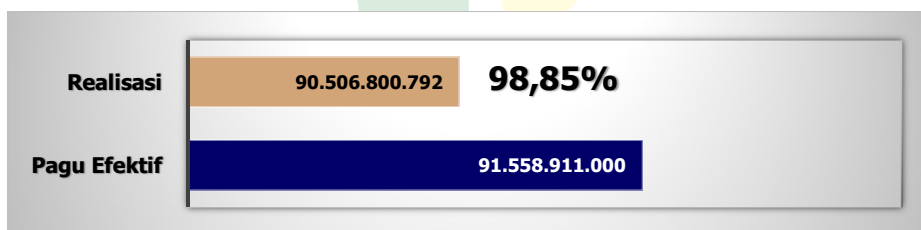
Tabel 21. Pagu Total dan Pagu Efektif Sekretariat BRMP TA 2025

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
Belanja Pegawai	9.120.491.000	-	9.120.491.000
Belanja Barang	84.297.556.000	2.000.871.000	82.296.685.000
Belanja Modal	141.735.000	-	141.735.000
TOTAL	93.559.782.000	2.000.871.000	91.558.911.000

Pada awal tahun anggaran, pagu anggaran Sekretariat BRMP berdasarkan DIPA Nomor DIPA-018.09.1.411971/2025 sebesar Rp88.367.960.000,00, dengan pagu blokir sebesar Rp38.619.548.000,00. Setelah melalui rangkaian revisi hingga revisi ke-19, pagu DIPA menjadi sebesar Rp93.559.782.000,00 dengan sisa lokir sebesar Rp2.000.871.000,00 pada akhir Tahun 2025.

Dengan demikian, pagu efektif Sekretariat BRMP Tahun 2025 sebesar Rp91.558.911.000,00. Berdasarkan aplikasi OMSPAN 13 Januari 2026, realisasi anggaran SP2D Sekretariat BRMP sebesar Rp90.506.800.792,00 atau sebesar 98,85 persen dari pagu efektif. sedangkan berdasarkan realisasi akrual sebesar Rp90.584.754.599,00 atau sebesar 98,93 persen dari pagu efektif. Perbedaan realisasi SP2D dan akrual ini karena masih adanya RPATA.

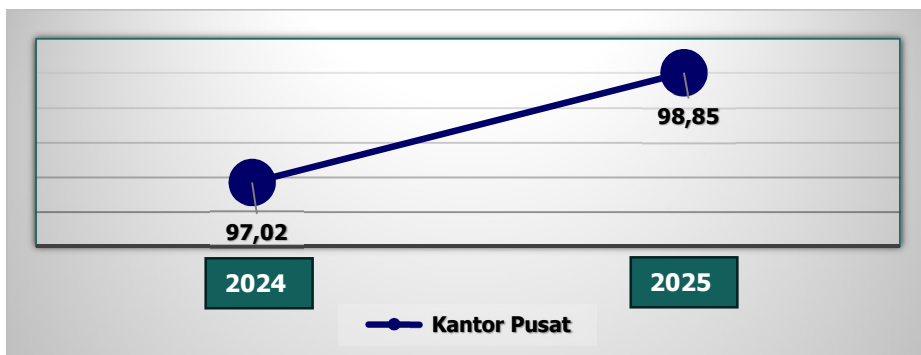
Realisasi SP2D tersebut terdiri atas 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.103.638.848,00 atau sebesar 99,82 persen, 2) Belanja Barang sebesar Rp81.261.961.944,00 atau sebesar 98,74 persen dari pagu efektif, dan 3) Belanja Modal sebesar Rp141.200.000,00 atau sebesar 99,62 persen. Perbandingan antara pagu efektif dan realisasi Sekretariat BRMP TA 2025 dapat dilihat pada Gambar 8. Rincian Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat BRMP TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.



Keterangan: Berdasarkan aplikasi OMSPAN tanggal 13 Januari 2026

Gambar 8. Perbandingan Pagu Efektif dan Realisasi SP2D BRMP TA 2025

Perkembangan realisasi anggaran selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan capaian pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran, serta tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengawal pelaksanaan kegiatan secara konsisten. Perkembangan realisasi anggaran tahun 2024-2025 disajikan pada Gambar 9.



Keterangan: Berdasarkan Aplikasi OMSPAN tanggal 13 Januari 2026

Gambar 9. Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat BRMP Periode 2024-2025

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat BRMP sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp762.879.270,00 atau 316,54 persen dari target sebesar Rp241.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Umum Rp311.479.270,00 dari target Rp96.000.000,00 atau 324,45 persen dan realisasi Penerimaan Fungsional Rp451.400.000,00 dari target Rp145.000.000,00 atau 311,31 persen.

Penerimaan Umum berasal dari: 1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp40.774.900,00, 2) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp30.500.000,00, 3) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp219.885.992,00, 4) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp21.192,00, 5) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp10.400.900,00, dan 6) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp9.896.286,00. Penerimaan Fungsional berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp451.400.000,00. Realisasi PNBP Sekretariat BRMP secara rinci disajikan pada Tabel 22 dibawah ini.

Tabel 22. Realisasi PNBP Sekretariat BRMP Tahun 2025

Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Penerimaan (Rp)
Penerimaan Umum	96.000.000	311.479.270	324,45	(215.479.270)
Penerimaan Fungsional	145.000.000	451.400.000	311,31	(306.400.000)
Jumlah	241.000.000	762.879.270	316,54	(521.879.270)



BAB IV

PENUTUP





AGRO MODERN

BAB IV

PENUTUP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi. Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025 memuat gambaran mengenai visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta capaian kinerja dan capaian keuangan selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, kinerja Sekretariat BRMP menunjukkan capaian yang sangat berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar **103,98%** dari lima indikator kinerja yang ditetapkan dalam Draft Renstra Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025 secara keseluruhan berada pada kategori **sangat berhasil**. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dengan target 95,00%, telah dan realisasi 97,26% atau capaian 102,37%; (2) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dengan target 95,00%, dan realisasi 100% atau capaian 105,26%; (3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP dengan target sebesar 91,00% dan realisasi 95,32% atau capaian 104,89%; (4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BRMP dengan target 3,60 dan realisasi 3,68 atau capaian 102,33%; serta (5) Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP dengan target 3,26, dan realisasi 3,43 atau capaian 105,07%.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi Sekretariat BRMP mencapai 98,85% dari pagu efektif yaitu Rp90.506.800.792,00. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, serta didukung oleh komitmen pimpinan, profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan pengelolaan sumber daya anggaran yang memadai.

Berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain melalui perencanaan yang lebih komprehensif dengan pendekatan manajemen risiko, pengawalan penganggaran secara lebih intensif untuk meminimalisasi pemblokiran anggaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran,

peningkatan kepatuhan terhadap prosedur administrasi keuangan dan pengadaan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat BRMP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kinerja Sekretariat BRMP pada masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang telah mencapai bahkan melampaui target kinerja diharapkan dapat menjadi praktik baik dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.



AGRO MODERN



LAMPIRAN

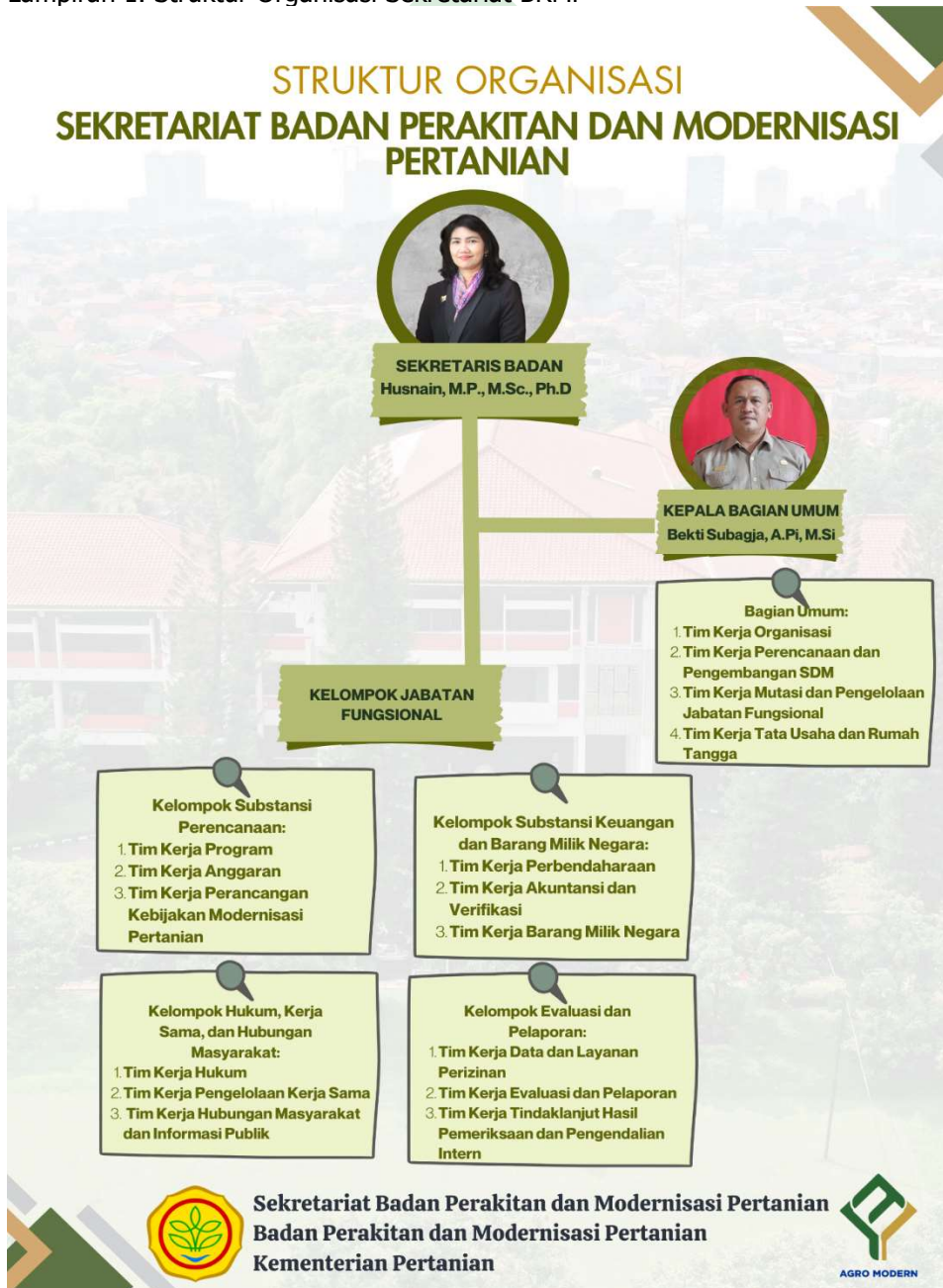




AGRO MODERN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat BRMP



Lampiran 2. Komposisi SDM Sekretariat BRMP Tahun 2025

No	Klasifikasi	Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)					Jumlah Pegawai (orang)
		S3	S2	S1/D4	D3/D2/D1	≤SLTA	
A	SDM Struktural	1	1	0	0	0	2
1	Eselon II	1	0	0	0	0	1
2	Eselon III	0	1	0	0	0	1
B	SDM Fungsional	1	21	33	3	2	60
1	Analisis Kebijakan	0	1	0	0	0	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	0	4	3	0	0	7
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	4	9	0	0	13
4	Arsiparis	0	0	5	0	0	5
5	Penata Perizinan	0	0	1	0	0	1
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	3	0	0	0	3
7	Perencana	1	3	2	0	0	6
8	Pranata Hubungan Masyarakat	0	4	2	0	0	6
9	Pranata Keuangan APBN	0	0	3	1	2	6
10	Pranata Komputer	0	1	6	0	0	7
11	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	0	0	0	2	0	2
12	Pustakawan	0	1	1	0	0	2
13	Statistisi	0	0	1	0	0	1
C	SDM Pelaksana	0	6	28	4	17	55
1	Pelaksana	0	6	28	4	17	55
D	SDM PPPK PENUH WAKTU	0	0	8	1	0	9
E	SDM PPPK PARUH WAKTU	0	0	11	3	31	45
JUMLAH		2	28	80	11	50	171

AGRO MODERN

Lampiran 3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat BRMP Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal	1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %	95,50 %	96,00 %	96,50 %	97,00 %
		2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %	95,50 %	96,00 %	96,50 %	97,00 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00 Nilai	91,50 Nilai	92,00 Nilai	92,50 Nilai	93,00 Nilai
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,60 Indeks (1-4)	3,65 Indeks (1-4)	3,69 Indeks (1-4)	3,74 Indeks (1-4)	3,78 Indeks (1-4)
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap dukungan manajemen Sekretariat BRMP	5. Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP	3,26 Indeks (1-4)	3,28 Indeks (1-4)	3,3 Indeks (1-4)	3,32 Indeks (1-4)	3,34 Indeks (1-4)

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PEM
TELEPON (021) 7805202, 7805203, 7805204, FAKSIMILI (021) 7805444
WEBSITE: www.bisp.pertanian.go.id e-mail: bisp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haris Syahbuddin
Jabatan : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Pertama



Haris Syahbuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	84,00 Nilai
		2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIR Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	3,0 Level
		3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Standardisasi Instrumen yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	95,00 %
		4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	95,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	89,00 Nilai

PROGRAM/KEGIATAN

Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian

Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 88.367.960.000,00

Rp. 88.367.960.000,00

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



Fadry Djufry

Jakarta, 24 Desember 2024

Sekretaris Badan



Haris Syahbuddin

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Revisi I Sekretariat BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
 TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
 WEBSITE: www.bmmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haris Syahbuddin
 Jabatan : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufr
 Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


 Fadry Djufr

Jakarta, Mei 2025

Pihak Pertama


 Haris Syahbuddin

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	84,00 Nilai
		2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,00 Level
		3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %
		4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	95,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	89,00 Nilai

No. **PROGRAM/KEGIATAN** **ANGGARAN**

Program Dukungan Manajemen **Rp 97.685.679.000**

1 **Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian** **Rp 97.685.679.000**

Pihak Kedua


 Fadry Djufr

Jakarta, Mei 2025

Pihak Pertama


 Haris Syahbuddin

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Revisi II Sekretariat BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
 TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
 WEBSITE: www.bmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnain
 Jabatan : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fadjry Djufry

Jakarta, Juli 2025

Pihak Pertama



Husnain

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	84,00 Nilai
		2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,00 Level
		3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00 %
		4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	95,00 %
2	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	89,00 Nilai

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Dukungan Manajemen	Rp 97.443.776.000
1	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 97.443.776.000

Pihak Kedua



Fadjry Djufry

Jakarta, Juli 2025

Pihak Pertama



Husnain

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir Sekretariat BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
 TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
 WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnain
 Jabatan : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama


Husnain

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	1.1. Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal	1.1. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00	%
		1.2. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	95,00	%
2	2.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	2.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00	Nilai
3	3.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,60	Indeks (1-4)
4	4.1. Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	4.1. Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,26	Indeks (1-4)

Kode Program/ Kegiatan
WA Dukungan Manajemen
 6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Anggaran (Rp)
 Rp 93.559.782.000
 Rp 93.559.782.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama


Husnain

Lampiran 8. SOP Pengumpulan Data

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	894.18/OT.210/14.1/05/2023
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Agustus 2023
	Dibuat oleh	Sekretaris Badan,
	Husaini, MP., M.Sc, Ph.D NIP. 197340102001122001	
NAMA SOP		PENGUMPULAN DATA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.059/PM/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian	1. Mampu mengoperasikan komputer dan software tertentu 2. Memahami tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 3. Memahami proses penyusunan laporan
Keterkaitan :	Peralatan/perangkat :
1. SOP Laporan Kegiatan Utama dan Output Utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2. SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. SOP Pemantauan Program dan Kegiatan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. SOP Penyusunan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5. SOP Penyusunan Laporan Akhir 6. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kementerian Pertanian 7. SOP Laporan Kegiatan Utama dan Output Utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. SOP Penyusunan Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian 9. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 10. SOP Laporan Kegiatan Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 2. Komputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Keterlambatan waktu pengumpulan data dan validitas data sangat mempengaruhi kualitas laporan	Geometrika dan format penyusunan bahan sudah ditentukan

SOP PENGUMPULAN DATA									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Standar Baku			
		Teknis	Kepala UK/UPT	Pelaksana	Ketua Tim Kerja Evalap	Ketua Kelompok Evalap	Sekretaris Badan	Kelengkapan	Waktu
1.	Menginstruksikan pelaksana untuk melakukan identifikasi kebutuhan data								2 hari
2.	Pelaksana :								
	a. Melakukan identifikasi kebutuhan data							Surat	1 hari
	b. Menyajikan surat Sekretaris Badan tentang permintaan data ke UK/UPT, dan mengajukan melalui Ketua Tim Kerja Evalap dan Ketua Kelompok Evalap							Surat	1 hari
3.	Sekretaris Badan :								
	a. Memandangkan surat permintaan data kegiatan							Surat	1 jam
	b. Menginstruksikan Ketua Tim Kerja Evalap melalui Ketua Kelompok Evalap untuk segera menyampaikan surat tersebut kepada UK/UPT yang bersangkutan								
4.	Ketua Tim Kerja Evalap menginstruksikan pelaksana untuk mengirimkan surat ke UK/UPT								10 menit
5.	Kepala UK/UPT menyajikan dan menyerahkan data kegiatan kepada Ketua Kelompok Evalap or Ketua Tim Kerja Evalap							Data	2 hari
6.	Ketua Tim Kerja menginstruksikan kepada pelaksana untuk mengkompilasi dan mengolah data kegiatan dari UK/UPT							Data	5 hari
7.	Pelaksana :								
	a. Melakukan pengecekan/validasi data ke teknis di UK/UPT							Validasi	1 hari
	b. Melakukan penyajian data akhir dan entry data ke dalam database dan melaporkan ke Ketua Tim Kerja Evalap							Data hasil validasi	1 hari
8.	Hasil database final							Selesai	
Total waktu yang diperlukan									13 hari 1 jam 10

Lampiran 9. SOP Penyusunan Lakin

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN SEKRETARIAT BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP: BPA.4/OT.2/10/11.1/08/2025 Tanggal Pembuatan: Agustus 2025 Tanggal Revisi: - Tanggal Edisi: Agustus 2025 Disahkan oleh: Sekretaris Huseini, M.P., M.Sc., Ph.D. NIP. 197302102001122001 NAMA SOP: PENYUSUNAN LAKIN BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri PUPHID Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rencana Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.005/14/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 10. Rencana Strategis BRMP Tahun 2025-2029	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN 2. Memahami pengelompokan kinerja 3. Memahami rencana strategis Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian 4. Memahami tugas dan fungsi Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian
Keterampilan : 1. SOP Penyusunan LAKIN Unit Kerja 2. SOP Penyusunan Laporan Akhir 3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	Peralatan/perangkat : 1. RKT 2. Perangkat kinerja 3. LAKIN unit kerja 4. Realisasi anggaran 5. Rencana strategis Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian 6. Laporan keuangan Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian 7. Laporan akhir kegiatan
Perlugetan : 1. Apabila LAKIN Unit Kerja terdapat kesalahan, maka berakibat terlanjutnya penyusunan LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian 2. Keterlambatan penyusunan LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian, maka akan berdampak pergeseran dari Kantor Kementerian Pertanian	Pesetasan dan Persetujuan : 1. Simbolisasi laporan sudah disetujui 2. Penerimaan laporan

SOP PENYUSUNAN LAKIN BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN										Standar Baku		
No.	Kegiatan	Kapalak PE	Pelaksana	Ketidakter Swag	Kapalak Swag	Substansi Badan	Rinc Perencanaan Kementerian Pertanian	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1.	Sekretaris Badan menerima LAKIN UK/UPP dan menyentralkannya kepada Katalinier. Enalap melalui Kapalak Enalap untuk ditindaklanjuti								1 hari	LAKIN UK/UPP		
2.	Katalinier Enalap menginformasikan kepada pelaksana untuk menyusun draft LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian								14 hari	Draft LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi		
3.	Katalinier Enalap mengoreksi draft LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian untuk diserahkan kepada Kapalak Enalap								1 hari			
4.	Kapalak Enalap meneruskan Katalinier Enalap melalui undangan Sekretaris Badan untuk mengundang Kapalak yang mengikuti Program dan Insiasi dalam rangka kemandirian LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian								1 hari			
5.	Katalinier Enalap melalui Pelaksana membuat surat tembol dan disetujui ke Kapalak Enalap untuk mendapatkan tanda tangan Sekretaris Badan								1 hari	Surat		
6.	Surat yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Badan dibikin kepada Kapalak UK/UPP								1 hari			
7.	Hasil kemandirian LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian yang sudah disetujui oleh Kapalak PE UK/UPP diujikan kepada Sekretaris Badan								5 hari			
8.	Sekretaris Badan mengoreksi draft LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian dan menyentralkannya kepada Kapalak Enalap								1 hari			
9.	Kapalak Enalap meneruskan Katalinier Enalap melalui undangan Sekretaris Badan untuk mengundang Kapalak yang mengikuti Program dan Insiasi dalam rangka kemandirian LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian								1 hari	LAKIN Badan Standardisasi Instrumen Pertanian		
10.	Katalinier Enalap menyentralkan LAKIN Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian kepada Pelaksana untuk dioreksi dan menyentralkannya pada Menteri Pertanian dan Renc Perencanaan Kementerian Pertanian								1 hari			
Total waktu yang dibutuhkan									27 hari			

Lampiran 10. SK Tim Evaluasi AKIP Sekretariat BRMP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 915/Kpts./OT.050/H.1/08/2025

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MANDIRI
SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian berjalan dengan baik, perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mandiri guna memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang ditetapkan sebagai tim evaluasi AKIP mandiri dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya Pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts/OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MANDIRI SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang selanjutnya disebut sebagai "Tim Evaluasi AKIP Mandiri" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi AKIP Mandiri Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 - B. Ketua : Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
 - C. Sekretaris : Ketua Kelompok Perencanaan
 - D. Pelaksana :
 1. Kepala Bagian Umum
 2. Ketua Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

- 3 -

3. Ketua Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
5. Ketua Tim Kerja Data dan Pelayanan Perizinan
6. Ketua Tim Kerja Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
7. Ketua Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian
8. Ketua Tim Kerja Program
9. Ketua Tim Kerja Anggaran
10. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
11. Ketua Tim Kerja Perbendaharaan
12. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
13. Ketua Tim Kerja Organisasi
14. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
15. Ketua Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
16. Ketua Tim Kerja Hukum
17. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
18. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
19. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

KETIGA : Tim Evaluasi AKIP Mandiri Sekretariat BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Menyusun Konsep Kontrak Kinerja, manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan matrik *cascading* Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Menatausahakan dokumen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKU, matrik *cascading*, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

- 4 -

4. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
5. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
6. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
8. Menatausahakan dokumen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang meliputi NCKO dan LAKIN serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KELIMA : Ketua Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Evaluasi AKIP Mandiri Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEENAM : Masa kerja Tim Evaluasi AKIP Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul dan diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Agustus 2025



SEKRETARIS BADAN PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN,

MUSMAIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 11. Manual IKS Sekretariat BRMP Tahun 2025

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN				
Sasaran dan Indikator Kinerja: Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian				
Kode	Nomenklatur Sasaran Kegiatan	Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan
SK.1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal	IKK.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)	%
		IKK.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)	%
SK.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	IKK.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
SK.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	IKK.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Skala Likert
SK.4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	IKK.5	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan	Skala Likert

1. Manual Indikator 1: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)

Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal
Definisi Sasaran Kegiatan	"Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal" adalah sasaran kegiatan yang menggambarkan tingkat penyelesaian atas rekomendasi, catatan, dan temuan yang diterbitkan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal terhadap BRMP. Sasaran ini memastikan bahwa setiap temuan audit ditangani secara sistematis melalui tindakan perbaikan, pemenuhan rekomendasi, dan peningkatan pengendalian internal, sehingga risiko berulangnya masalah dapat diminimalkan serta mutu tata kelola organisasi semakin meningkat.
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.1 - Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap total rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Formula $TL = \frac{TL_t}{R(t-1)} \times 100\%$ TL: Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti BRMP terhadap total rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal TL_t: Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (t-1) R(t-1): Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (t-1) Tujuan Untuk menilai efektivitas tindak lanjut BRMP terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan program dan anggaran, serta memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan BRMP.
Satuan	%
Target	2025: 95,00 2026: 96,00 2027: 97,00 2028: 98,00 2029: 98,00

Link dengan RPJMN	Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu
Tingkat Kendali	☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Validitas	☐ Low ☐ Moderate ☒ High
Jenis cascading IKU	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Metode Cascading	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta
	☐ Non Cascading
	☐ Adopsi Langsung
	☐ Diintegrasikan
	☒ Komponen Pembentuk
	☐ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☐ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Bagian Umum; Kelompok Substansi Perencanaan, Kelompok Substansi KBM, Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan)
Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan dokumentasi tindak lanjut BRMP
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Trwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Keterlambatan penyampaian bukti tindak lanjut → dilakukan monitoring berkala dan koordinasi aktif dengan auditor IIjen. 2. Bukti tindak lanjut tidak memadai → dilakukan review internal sebelum disampaikan ke IIjen. 3. Perbedaan persepsi status penyelesaian → dilakukan klarifikasi dan rekonsiliasi data dengan IIjen.
Catatan	

2. Manual Indikator 2: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)

Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal
Definisi Sasaran Kegiatan	“Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal” adalah sasaran kegiatan yang menggambarkan tingkat penyelesaian atas rekomendasi, catatan, dan temuan yang diterbitkan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal terhadap BRMP. Sasaran ini memastikan bahwa setiap temuan audit ditangani secara sistematis, melalui tindakan perbaikan, pemenuhan rekomendasi, dan peningkatan pengendalian internal, sehingga risiko berulangnya masalah dapat diminimalkan serta mutu tata kelola organisasi semakin meningkat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan BRMP, sebagai wujud peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil audit eksternal. Formula $TLBPK = \frac{TLBPK_t}{RBPK(t-1)} \times 100\%$ TLBPK : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK TLBPK_t : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (t-1) RBPK(t-1): Jumlah rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya (t-1) Tujuan Untuk menilai tingkat efektivitas tindak lanjut BRMP terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan BRMP.
Satuan	%
Target	2025: 95,00 2026: 96,00 2027: 97,00

AGRO MODERN

	2028: 98,00 2029: 98,00
Link dengan RPJMN	Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja Terlibat	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Keuangan
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☐ Moderate ☒ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☒ Komponen Pembentuk ☐ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☐ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Sekretariat, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Bagian Umum; Kelompok Substansi Perencanaan; Kelompok Substansi KBMN; Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan)
Sumber Data	Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan dokumen tindak lanjut resmi BRMP
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Trivulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut → dilakukan koordinasi rutin dengan tlen dan unit terkait 2. Kurangnya bukti tindak lanjut yang sah → dilakukan verifikasi internal sebelum penyampaian ke BPK 3. Ketidaksesuaian klasifikasi rekomendasi → dilakukan validasi silang dengan tlen.
Catatan	

3. Manual Indikator 3: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)

Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementan
Definisi Sasaran Kegiatan	Menggambarkan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan anggaran pada unit eselon I Kementerian Pertanian. Sasaran ini menekankan penguatan tata kelola keuangan melalui kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu dan ketepatan sasaran belanja, serta optimalnya capaian output sebagai hasil pemanfaatan anggaran. Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, diharapkan kinerja program dan kegiatan dapat tercapai secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini mengukur tingkat kualitas pelaksanaan anggaran di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN. Nilai IKPA mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (<i>good governance</i>). Formula Nilai IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan komposit beberapa indikator seperti i Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Tujuan Untuk menilai sejauh mana BRMP mampu melaksanakan anggaran secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai dasar evaluasi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran dan perencanaan ke depan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 89,00 2026: 89,50 2027: 90,00 2028: 90,50 2029: 90,50
Link dengan RPJMN	Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja Terlibat	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

AGRO MODERN

Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☐ Moderate ☒ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☐ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Bagian Umum; Kelompok Substansi Perencanaan; Kelompok Substansi KBMN; Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan)
Sumber Data	Aplikasi Online Monitoring (OM-SPAN)
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Keterlambatan penyampaian laporan dan data → dilakukan monitoring rutin setiap bulan dan koordinasi dengan KPPN. 2. Kesalahan input data pada aplikasi OM-SPAN → dilakukan validasi internal sebelum periode penilaian. 3. Rendahnya penyerapan anggaran → dilakukan percepatan proses administrasi dan evaluasi kegiatan secara triwulan.
Catatan	

4. Manual Indikator 4: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Menggambarkan peningkatan kualitas, kenyamanan, kemudahan, serta keandalan layanan publik yang diberikan BRMP berdasarkan persepsi pengguna layanan. Sasaran ini mencerminkan upaya berkelanjutan BRMP dalam memperbaiki standar layanan, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan responsivitas, serta memastikan bahwa masyarakat memperoleh pengalaman layanan yang memenuhi atau melampaui harapan mereka.
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan pengguna layanan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Indikator ini menggambarkan persepsi masyarakat terhadap aspek pelayanan seperti prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta kualitas hasil layanan. Formula Nilai rata-rata survey Indeks Kepuasan Masyarakat dari seluruh satuan kerja lingkup BRMP Tujuan Indikator ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan publik yang diberikan BRMP berdasarkan penilaian langsung dari penerima layanan. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar peningkatan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan responsivitas, dan perbaikan sarana-prasarana layanan. Selain itu, indikator ini memastikan bahwa pelayanan BRMP berlangsung secara transparan, akuntabel, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi.
Satuan	Skala Likert
Target	2025: 3,6 2026: 3,65 2027: 3,69 2028: 3,74 2029: 3,78
Link dengan RPJMN	Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-

Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian				
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu				
	☐ Waktu ☐ Biaya				
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High				
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact				
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta				
	☐ Non Cascading				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung				
	☐ Dipersempit				
	☒ Komponen Pembentuk				
	☐ Tidak Diturunkan (Buat Baru)				
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize				
Unit/ Pihak Penyedia Data	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Kelompok Substansi KSHH)				
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan lingkup BRMP				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Trwulan ☒ Semesteran ☒ Tahunan				
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendahnya tingkat partisipasi atau respons</td><td>Melakukan sosialisasi pentingnya IKM bagi pengguna layanan</td></tr> </tbody> </table>	Risiko	Mitigasi	Rendahnya tingkat partisipasi atau respons	Melakukan sosialisasi pentingnya IKM bagi pengguna layanan
Risiko	Mitigasi				
Rendahnya tingkat partisipasi atau respons	Melakukan sosialisasi pentingnya IKM bagi pengguna layanan				
Catatan					

5. Manual Indikator 5: Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan

Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Sasaran ini mengukur tingkat kepuasan unit eselon II (satker atau direktorat di bawah BRMP) terhadap kualitas dan efektivitas layanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat BRMP.
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Mengukur tingkat kepuasan unit eselon II (direktorat atau satker di bawah BRMP) terhadap kualitas, ketepatan, dan efektivitas layanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat BRMP. Formula Indeks Kepuasan dihitung berdasarkan rata – rata nilai survei kepada unit eselon II lingkup BRMP dengan menggunakan skala Likert (1-4) Tujuan Tujuan dari Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRMP adalah untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan dukungan manajemen yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, komunikasi, dan dukungan administratif kepada unit eselon II. Indikator ini juga berfungsi sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan, memastikan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat BRMP, serta mendukung tercapainya kinerja manajemen internal yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan unit-unit di bawahnya.
Satuan	Nilai
Target	2025: 3,26 2026: 3,28 2027: 3,30 2028: 3,32 2029: 3,34
Link dengan RPJMN	Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu

	☐ Waktu ☐ Biaya	
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High	
Tingkat Validitas	☐ Activity ☒ Proxy ☐ Exact	
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Bagian Umum; Kelompok Substansi Perencanaan; Kelompok Substansi KBMN; Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan)	
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen Sekretariat kepada Unit Eselon II lingkup BRMP	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko	Risiko	Mitigasi
	Risiko responden memberikan jawaban tidak jujur atau bias	Memastikan survei bersifat anonim, gunakan pertanyaan yang jelas dan netral, serta melibatkan enumerator yang terlatih agar tidak mempengaruhi jawaban
	Risiko rendahnya partisipasi unit eselon II	Sosialisasi pentingnya survei dan manfaat hasil survei, menjadwalkan survei secara fleksibel, dan menyampaikan pentingnya partisipasi untuk membantu perbaikan layanan.
Catatan		

AGRO MODERN

Lampiran 12. Rencana Aksi Sekretariat BRMP Tahun 2025

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (sampai dengan Desember tahun 2025)																
No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tercapainya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Indeks (0-1)	0,80	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)	95,00	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	B01: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn	70 tindak lanjut rekomendasi	100	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP Ijèn Kementerian Pertanian Penerimaan Tahun 2024 dan 2025 dengan jenis pemeriksaan Kinerja sebanyak 2 LHP
B02: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn								42 tindak lanjut rekomendasi	100	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP Ijèn Kementerian Pertanian Penerimaan Tahun 2025 dengan jenis pemeriksaan Kinerja sebanyak 2 LHP		
B03: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn								49 tindak lanjut rekomendasi	100	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP Ijèn Kementerian Pertanian Penerimaan Tahun 2025 dengan jenis pemeriksaan Kinerja sebanyak 2 LHP dan hasil reviu sebanyak 2 LHP		
B04: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn								60 tindak lanjut rekomendasi	100	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP Ijèn Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2024 dengan jenis pemeriksaan hasil audit kinerja sebanyak 2 LHP dan hasil reviu sebanyak 2 LHP		
								B05: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn	142 tindak lanjut rekomendasi	100	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP Ijèn Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2024 dengan jenis pemeriksaan kinerja 1 LHP dan penerimaan TA 2025 dengan jenis pemeriksaan kinerja 3 LHP
								B06: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn	65 tindak lanjut rekomendasi	100						Dokumen Tindak lanjut LHP Ijèn Kementan penerimaan TA 2025 dengan jenis pemeriksaan hasil reviu lanjutan usulan pembusukan blokir anggaran BSP dan reviu pengendalian internal atas pelaporan keuangan TK UAPPA E1
								B07: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn	55 tindak lanjut rekomendasi	100						Dokumen Tindak lanjut LHP Ijèn Kementan penerimaan TA 2025 dengan jenis pemeriksaan hasil reviu lanjutan dan reviu pengendalian internal atas pelaporan keuangan
								B08: Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijèn	60 tindak lanjut rekomendasi	100						Dokumen Tindak Lanjut LHP Ijèn Kementan Penerimaan TA 2025 dengan jenis pemeriksaan 1 Hasil Pemantauan, 1 Hasil Pengawasan dan 1 Hasil Audit Kinerja

No	Sasaran Program			IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence
											Fisik	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										B09 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijen	108 tindak lanjut rekomendasi	100				Dokumen Tindak Lanjut LHP Ijen Kementerian Penerimaan 2025 dengan jenis pemeriksaan 1 Hasil Audit Kinerja, 1 Hasil Reviu atas LK dan 1 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
										B10 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijen	68 tindak lanjut rekomendasi	100				Dokumen Tindak Lanjut LHP Ijen Kementerian Penerimaan 2025 dengan jenis pemeriksaan 2 LHP Hasil Audit Kinerja, 1 LHP Hasil Pendampingan, 2 LHP Hasil Pengawasan dan 1 LHP Hasil Audit Ketataan
										B11 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijen	120 tindak lanjut rekomendasi	100				Dokumen Tindak Lanjut LHP Ijen Kementerian Penerimaan 2025 dengan jenis penerimaan 4 LHP Hasil Reviu, 2 LHP Audit Kinerja dan 1 LHP Hasil Audit Tujuan Tertentu
										B12 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP Ijen	206 tindak lanjut rekomendasi	100				Dokumen Tindak Lanjut LHP Ijen Kementerian Penerimaan 2025 dengan jenis penerimaan 1 LHP Hasil Audit Ketataan, 2 LHP Hasil Pemantauan, 3 LHP Hasil Reviu, 3 LHP Hasil Audit Kinerja dan 1 LHP Hasil Penjamin Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri/Maturitas SPI
						Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (%)		95,00	Sekretariat/ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	B01 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 dan 2023. Sampai dengan Desember 2024, terdapat 20 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi LK 2022 dan 10 rekomendasi LK 2023 (8 rekomendasi LK 2022 telah sesuai dan 3 rekomendasi LK 2023 telah sesuai).
										B02 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan Januari 2025, terdapat 10 rekomendasi LK 2023 (5 rekomendasi LK 2023 telah sesuai).
										B03 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan Maret 2025, terdapat 2 Usulan Tindak Lanjut atas LHP LK Kementerian Pertanian TA 2023 dan terdapat 5 rekomendasi LK 2023 yang statusnya telah sesuai).

No	Sasaran Program			IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										B04 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan April 2025, terdapat 2 Usulan Tindak Lanjut atas LHP LK Kementerian Pertanian TA 2023 dan terdapat 5 rekomendasi LK 2023 yang statusnya telah sesuai).
										B05 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan April 2025, terdapat 2 Usulan Tindak Lanjut atas LHP LK Kementerian Pertanian TA 2023 dan terdapat 5 rekomendasi LK 2023 yang statusnya telah sesuai).
										B06 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan April 2025, terdapat 2 Usulan Tindak Lanjut atas LHP LK Kementerian Pertanian TA 2023 dan terdapat 5 rekomendasi LK 2023 yang statusnya telah sesuai).
										B07 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	-	-	-	-	-	Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023. Sampai dengan Juni 2025, terdapat 2 Usulan Tindak Lanjut atas LHP LK Kementerian Pertanian TA 2023 dan terdapat 5 rekomendasi LK 2023 yang statusnya telah sesuai).
										B08 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK						
										B09 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK						
										B10 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK						
										B11 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK						
										B12 : Tersedianya dokumen tindak lanjut atas LHP BPK	14 rekomendasi	100	Seluruh rekomendasi LK 2024 sebanyak 14 rekomendasi telah diindaklanjuti dengan Surat Instruksi Kepala Badan			Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2024

No	Sasaran Program			IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	91,00	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	B01: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 5%	1 Dokumen	100	Penginputan data realisasi rincian output dilakukan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen dan terdapat jeda sehingga data realisasi rincian output dapat terlihat pada aplikasi Monev Kemenkeu	Melakukan penginputan data capaian Rincian Output tepat waktu		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Januari
										B02: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 10 %	1 Dokumen	100	Penginputan data realisasi rincian output dilakukan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen dan terdapat jeda sehingga data realisasi rincian output dapat terlihat pada aplikasi Monev Kemenkeu	Melakukan penginputan data capaian Rincian Output tepat waktu		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Februari
										B03: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 15 %	1 Dokumen	100	Penginputan data realisasi rincian output dilakukan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen dan terdapat jeda sehingga data realisasi rincian output dapat terlihat pada aplikasi Monev Kemenkeu	Melakukan penginputan data capaian Rincian Output tepat waktu		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Maret
										B04: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 20 %	1 Dokumen	100	-	-		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan April dan screenshot Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu
										B05: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 30 %	1 Dokumen	100	-	-		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Mei dan screenshot Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu
										B06: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 45 %	1 Dokumen	100	-	-		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Juni dan screenshot Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu
										B07: Terlaksananya entri dan validasi realisasi fiskal dan progress per Rincian Output dengan target NK sebesar 50%	1 Dokumen	100	-	-		Matriks Capaian Rincian Output TA 2025 bulan Juli dan screenshot Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

No	Sasaran Program			IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										B08 : Terfaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 60%	1 Dokumen	100,00	Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)		- Screenshorf Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Agustus - Screenshorf Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART
										B09 : Terfaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 70%	1 Dokumen	100,00	Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)		- Screenshorf Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan September - Screenshorf Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART
										B10 : Terfaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 75%	1 Dokumen	100,00	Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)		- Screenshorf Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Oktober - Screenshorf Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART
										B11 : Terfaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan	1 Dokumen	100,00	Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)		- Screenshorf Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan November - Screenshorf Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART - Screenshorf Nilai IKPA bulan November 2024
										B12 : Terfaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan	1 Dokumen	100,00	Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)		- Screenshorf Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Desember - Screenshorf Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART - Screenshorf Nilai IKPA bulan Desember 2024
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3,00	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	B01 : Tersusunnya pedoman dan instrumen SKM	Pedoman teknis, instrumen kuesioner, jadwal SKM	10,00	Indikator baru, pemahaman UK/UPT belum merata	Sosialisasi dan bimtek SKM	Kesiapan UK/UPT melaksanakan SKM	Pedoman SKM, materi sosialisasi
										B02 : Kesiapan pelaksanaan SKM	UK/UPT siap melaksanakan survei	15,00	Adaptasi awal metode survei	Pendampingan teknis UK/UPT	Konsistensi instrumen	Notulen pendampingan
										B03 : SKM mulai berjalan	Pengumpulan data awal responden	25,00	Responden belum merata	Perluasan diseminasi survei	Kenaikan jumlah responden	Rekap responden
										B04 : Peningkatan partisipasi responden	Data SKM terkumpul bertahap	35,00	Meningkatkan responden	Monitoring rutin		Laporan monitoring
										B05 : Stabilitas pelaksanaan SKM	Survei berjalan konsisten	45,00	Beban kerja petugas	Penguatan koordinasi	Ketepatan waktu pengisian	Rekap bulanan

No	Sasaran Program			IKSP	Satuan	Target	IKSK	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence
	1	2	3								12	13				
				5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17
										B06 : Kualitas data meningkat dan lengkap	Data SKM valid dan lengkap	55,00	Variasi kualitas layanan	Klarifikasi dan validasi data	Akurasi data	Berta acara validasi
										B07 : Cakupan responden meluas	Responden meningkat signifikan	65,00	Informasi layanan belum seragam	Pemutakhiran informasi layanan	Konsistensi informasi	Update website/medsos
										B08 : Penguatan kualitas layanan	Masukan masyarakat teridentifikasi	75,00	Produk layanan perlu penyesuaian	Penyempurnaan standar layanan	Perbaikan unsur layanan	Dokumen SOP
										B09 : SKM mendekati target responden	Responden hampir terpenuhi	85,00	Keterbatasan SDM	Optimalisasi petugas	Efektivitas pelaksanaan	Rekap responden
										B10 : Pengumpulan data SKM selesai	Data SKM final terkumpul	95,00	Penutupan periode survei	Finalisasi data	Kelengkapan data	Database SKM
										B11 : Pengolahan dan analisis IKM	Nilai unsur dan IKM dihitung	100,00	Perlu ketelitian analisis	Review dan validasi hasil	Akurasi nilai IKM	Draft laporan SKM
										B12 : Tercapainya target IKM	Laporan SKM dan rekomendasi	102,33	Unsur produk relatif terendah	Rencana perbaikan layanan	Integrasi ke perencanaan 2026	Laporan SKM final
						Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP		3,28	Sekretariat, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	B01 : Kesiapan pelaksanaan survei	Pedoman, instrumen survei, jadwal dan responden ditetapkan	10,00	Indikator baru, pemahaman belum merata	Sosialisasi survei dan unsur penilaian	Kesiapan unit eselon II	Pedoman dan instrumen survei
										B02 : Pemahaman pengguna layanan meningkat	Unit eselon II memahami mekanisme survei	15,00	Adaptasi awal metode survei	Pendampingan teknis	Konsistensi pemahaman	Notulen pendampingan
										B03 : Survei mulai berjalan	Pengumpulan data awal	25,00	Partisipasi responden awal	Penguatan komunikasi	Peningkatan responden	Rekap responden
										B04 : Partisipasi responden meningkat	Data survei terkumpul bertahap	35,00	Kesibukan unit	Monitoring rutin	Kepatuhan pengisian	Laporan monitoring
										B05 : Pelaksanaan survei stabil	Survei berjalan konsisten	45,00	Beban kerja tinggi	Koordinasi lintas unit	Ketepatan waktu	Rekap bulanan
										B06 : Kualitas data terjaga	Data survei valid	55,00	Variasi persepsi layanan	Klarifikasi dan validasi	Akurasi data	BA validasi
										B07 : Cakupan responden luas	Mayoritas responden berpartisipasi	65,00	Informasi layanan belum seragam	Pemutakhiran informasi layanan	Konsistensi layanan	Update SOP/informasi
										B08 : Masukan layanan teridentifikasi	Isu layanan utama terpetakan	75,00	Kecepatan layanan	Penyempurnaan SOP	Perbaikan proses	Dokumen SOP
										B09 : Target responden hampir tercapai	Responden mendekati target	85,00	Keterbatasan SDM	Optimalisasi petugas	Efektivitas layanan	Rekap responden
										B10 : Pengumpulan data selesai	Data survei final terkumpul	95,00	Penutupan periode survei	Finalisasi data	Kelengkapan data	Database survei
										B11 : Indeks kepuasan dihitung	Nilai unsur dan indeks dihitung	100,00	Ketelitian pengolahan	Review dan validasi	Akurasi indeks	Draft laporan
										B12 : Target indeks tercapai	Laporan survei dan rekomendasi	105,07	Unsur kecepatan & pengaduan	Rencana perbaikan layanan	Integrasi ke rencana 2026	Laporan survei final

Jakarta, Desember 2025
Sekretaris Badan

Husnaini, M.P., M.Sc., Ph.D
NIP. 197309102001122001

Lampiran 13. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Eselon I	Jenis Pengawasan	Jml LHP	Rekomendasi			Tindak Lanjut			Sisa		
				Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai
8	BRMP	Audit Ketataan	4	83	36	3.422.157.414,33	64	36	3.004.806.236,33	19	0	417.551.178,00
		Audit Kinerja	24	653	211,00	2.448.417.359,71	638	211,00	2.448.417.359,71	15	0,00	0,00
		Evaluasi SAKIP	1	13	0	0,00	13	0	0,00	0	0	0,00
		Pengawasan (SPIP)	17	106	0	0,00	100	0	0,00	6	0	0,00
		Revisi BMN	2	36	0	0,00	35	0	0,00	1	0	0,00
		Revisi HPS	1	7	0	0,00	4	0	0,00	3	0	0,00
		Revisi LK	5	283	0	0,00	282	0	0,00	1	0	0,00
		Revisi PIPK	1	7	0	0,00	7	0	0,00	0	0	0,00
		Revisi RKA-KI	5	202	0	0,00	202	0	0,00	0	0	0,00
		Tindak Lanjut BPK-RI	2	2	0	0,00	2	0	0,00	0	0	0,00
Grand Total			63	1399	247	5.870.574.774,04	1354	247	5.453.023.596,04	45	0	417.551.178,00

Lampiran 14. Matriks LHP BPK Tahun 2024 pada BSIP

Tahun LHP	No. LHP	LHP	Eselon I terkait	Status Terkini	Jenis LHP
2024	12/LHP/XVII/05/2024	Ketersediaan dan keterjangkauan mewujudkan ketahanan pangan	PSP, BSIP, BBSDLP	BS	LK Kinerja
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	Setjen, BSIP, SDM	BS	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	Setjen, PSP, TP, SDM, Horti, PKH, BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	Setjen, PSP, TP, SDM, Horti, PKH, BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	Setjen, PSP, TP, SDM, Horti, PKH, BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK APBN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN
2024	46/LHP/XVII/06/2024	LK ICARE Tahun 2023	BSIP	Sesuai	LK PHLN

Lampiran 15. Nilai IKPA Lingkup BRMP Tahun 2025

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		95,45
1	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	100
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	100
3	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	100
4	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	99,97
5	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	99,79
6	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika	99,70
7	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	99,21
8	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	98,80
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	98,72
10	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	98,55
11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	98,29
12	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis Dan Serat	98,26
13	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	98,25
14	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	98,23
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	98,16
16	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	98,08
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	97,98
18	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri Dan Penyegar	97,79
19	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	97,74
20	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	97,74
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	97,72
22	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik	97,46
23	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	97,27
24	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	97,15
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	97,14
26	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	97,06
27	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	96,87
28	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	96,86
29	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	96,27
30	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	96,18
31	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah Dan Pupuk	96,13

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
32	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian	96,12
33	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak	95,99
34	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	95,84
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	95,58
36	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	95,32
37	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	95,26
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	95,10
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	95,09
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	95,03
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	94,95
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	94,89
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	94,68
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	94,50
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	94,30
46	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	94,27
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	93,82
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	93,69
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	93,63
50	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	93,51
51	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	92,98
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	92,89
53	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	92,78
54	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan Dan Kesehatan Hewan	92,74
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	92,56
56	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	92,03
57	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	91,95
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	91,78
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	90,27
60	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	90,25
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	90,02
62	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	89,70
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	89,50
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	89,49

Lampiran 16. Hasil Pelaksanaan SKM OPP Lingkup BRMP Tahun 2025

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
1	BRMP Pengelola Hasil	Tahunan	Perlindungan Kekayaan Intelektual	55	87,5	88,59	88,04	87,5	87,5	91,85	93,48	89,13	87,5	89,01	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Penguatan SOP dan Monev Dumas	100%
			Kerjasama Lisensi	113	87,83	87,17	86,95	88,05	87,61	87,39	90,27	87,61	87,39	87,81				
			Informasi	82	84,34	84,62	86,26	83,79	83,52	84,62	87,36	84,89	83,24	84,74				
				250	86,5	86,5	87,1	86,6	86,2	87,4	90	86,1	87	87,04				
2	BRMP Tanaman Pangan	Tahunan	Informasi dan Konsultasi Inovasi Teknologi Tanaman Pangan	77	91,67	91,03	91,67	100	88,78	91,35	92,31	94,87	91,67	92,59	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Identifikasi produk layanan sesuai standar	100%
			Perpustakaan	45	86,36	86,36	89,2	100	86,36	88,64	89,77	99,43	89,2	90,59				
				122	89,75	89,34	90,78	100	87,91	90,37	91,39	96,52	90,78	91,87				
3	BRMP Tanaman Aneka Kacang	Tahunan	Pengujian Laboratorium Akreditasi	139	99,18	97	97	97	85	99,75	100	100	100	97,21	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi pengenalan biaya	100%
			Penyediaan Benih Sumber Aneka Kacang	508	92,74	94,92	92,54	94,5	92,54	92,93	90,62	100	92,61	93,71				
			Konsultasi dan Informasi Aneka Kacang	534	100	99,29	98,79	98,74	98,64	98,13	98,79	98,48	99,75	98,96				
				1181	97,31	97,07	96,11	92,75	96,98	97,02	96,47	99,49	97,45	96,60				
4	BRMP Tanaman Sereal	Tahunan	Pengujian Standar Instrumen Sereal	3	89	83	89	89	89	89	78	83	61	83,33	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Pelaksanaan FKP	100%
			Pengelolaan Produk Instrumen Sereal	47	94	94	94	89	94	93	94	93	90	92,78				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Konsultasi dan Informasi Standar Instrumen Sereal	35	96	96	95	94	95	95	96	94	91	94,67				
			Kunjungan	52	92	93	94	91	93	95	93	93	88	92,44				
			Magang	41	91	91	91	92	91	92	93	91	91	91,44				
			Perpustakaan	19	96	96	96	96	96	96	97	96	95	96,00				
				197	93,00	93,00	93,00	92,00	92,00	94,00	94,00	90,00	93,00	92,88				
5	BRMP Tanaman Aneka Umbi	Tahunan	Penyebarluasan Hasil Standardisasi	148	90,25	87,29	86,44	100	88,56	89,41	91,1	97,03	89,83	91,10	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Implementasi SOP	100%
				148	90,25	87,29	86,44	100	88,56	89,41	91,10	97,03	89,83	91,10				
6	BRMP Padi	Tahunan	Pengujian Standar Instrumen Padi	11	86,36	86,36	86,36	95,45	88,64	88,64	90,91	86,36	93,18	89,14	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Perawatan dan penataan ulang sarpras	100%
			Pengelolaan Produk Instrumen Padi	54	89,81	85,19	86,11	84,26	89,81	91,67	92,59	86,11	88,43	88,22				
			Konsultasi dan Informasi Standar Instrumen Padi	664	92,81	90,66	91,27	86,86	92,24	93,56	93,86	89,16	85,96	90,71				
				729	92,49	90,19	90,81	86,80	92,01	93,35	93,72	88,89	86,25	90,50				
7	BRMP Hortikultura	Tahunan	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura	12	91,67	93,75	91,67	95,83	87,5	91,67	91,67	89,58	97,92	92,36	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi	11	93,18	90,91	95,45	97,73	88,64	90,91	93,18	93,18	93,18	92,93				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Hortikultura															
			Konsultasi Standardisasi Instrumen Hortikultura	120	90	89,17	89,58	93,13	89,38	91,67	89,58	90,42	88,54	90,16				
				143	90,38	89,69	90,21	93,71	89,16	91,61	90,03	90,56	89,69	90,56				
8	BRMP Sayuran	Tahunan	Laboratorium Pengujian	101	90,84	90,59	83,91	75,74	85,64	86,88	91,58	96,04	86,14	87,48	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi dan penyederhanaan prosedur serta pemanfaatan TI	100%
			Penyebarluasan Hasil Standardisasi	230	86,14	85,15	84,61	97,49	85,04	87,77	91,38	97,93	85,7	89,02				
			Unit Pengelola Benih Sumber	159	95,75	95,75	94,34	82,86	93,4	94,65	95,44	99,37	93,87	93,94				
				490	90,18	89,72	87,32	88,09	87,53	89,67	92,59	98,01	88,19	90,14				
9	BRMP Buah Tropika	Tahunan	Magang, Perpustakaan, Kunjungan Tamu	342	89,9	91,1	90,6	90,4	91,9	91,5	93	91,4	92,4	91,36	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			Pengujian	15	98	98,7	98,7	97,3	88,7	94,7	93,3	97,3	93,3	95,56				
			Benih Sumber	15	94	92,7	90	91,3	90	96	98	98	93,3	93,70				
				372	93,97	94,17	93,10	93,00	90,20	94,07	94,77	95,57	93,00	93,54				
10	BRMP Hias	Tahunan	Pengujian	7	83,33	80,56	80,56	79,63	80,56	83,33	83,33	83,33	83,33	82,00	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi dan penyederhanaan prosedur , pelatihan petugas, pemanfaatan TI	100%
			Penyediaan Benih Sumber	43	85,8	83,52	81,25	83,52	82,39	85,8	81,82	82,39	80,11	82,96				
			Penyebarluasan Hasil Standardisasi	79	83,72	84,54	83,22	85,53	84,21	85,69	85,64	85,86	85,53	84,88				
				129	84,40	83,91	82,36	84,43	83,33	85,56	84,17	84,50	83,53	84,02				
11	BRMP Jeruk dan Buah Subtropika	Tahunan	Pengujian	7	100	100	82,15	82,15	100	100	100	100	96,43	95,64	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			Bimtek	5	85	80	75	75	75	75	80	100	85	81,11				
			Agro Eduwisata	521	85,25	84,03	83,95	84,05	83,05	85,55	87,4	96,55	87,45	86,36				
			PKL	37	89,88	86,48	84,45	95,15	82,43	87,85	89,88	98,6	85,73	88,94				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon dende	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
				570	85,75	84,35	83,88	84,65	83,15	85,80	87,65	96,78	87,43	86,60				
12	BRMP Perkebunan	Tahunan	Pengelolaan Produk Instrumen dan Konsultasi Standardisasi Instrumen Perkebunan	231	89,5	88,75	87,75	88	89,25	90,75	92,75	94,25	91	90,22	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi standar waktu pelayanan	0%
				231	89,50	88,75	87,75	88,00	89,25	90,75	92,75	94,25	91,00	90,40				
13	BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Tahunan	Laboratorium Pengujian	179	89	90,75	88,75	81	87	88,75	91	95	90,75	89,11	Hybrid (Manual dan Online)	Persyaratan Produk	Sosialisasi persyaratan dan produk layanan	100%
			Pengelolaan Produk Instrumen	46	87,5	88,5	88,5	88,5	88	88,5	88,5	88,5	88,5	88,33				
			Diseminasi Standardisasi Instrumen	185	86,5	87,75	87,5	87,38	87	88,75	91	91	89,75	88,51				
				410	87,50	88,88	88,88	87,88	87,50	89,13	91,13	92,63	90,63	89,32				
14	BRMP Tanaman Pemanis dan Serat	Tahunan	Laboratorium	18	93,06	93,06	90,28	86,11	88,89	88,89	88,89	90,28	97,22	90,74	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			UPBS	61	93,75	95,31	93,75	81,25	87,5	85,94	92,19	85,94	95,31	90,10				
			Penyebarluasan Hasil	349	93,75	87,5	86,25	84,13	92,69	85,94	90,69	90,44	88,44	88,87				
				428	92,74	91,44	91,54	89,39	86,68	87,44	88,51	90,51	88,22	90,04				
15	BRMP Tanaman Palma	Tahunan	Konsultasi informasi teknologi	15	86,75	86,75	88,25	80	83,25	80	83,25	83,25	85	84,06	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi pengenalan biaya	100%
			Kunjungan, magang, bimtek, dan narasumber	69	88	88,5	89,5	88,5	88,75	83,75	91,75	92,5	87,25	88,72				
			Kerjasama	10	97,5	92,5	97,5	82,5	95	90	92,5	97,5	95	93,33				
			Penyediaan benih sumber	19	90,75	89,5	86,75	98,75	90,75	84,25	92	86,75	86,75	89,58				
			Laboratorium	3	91,75	100	100	75	91,75	91,75	91,75	91,75	100	92,64				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
				116	89,08	88,84	86,71	89,00	87,56	91,71	90,49	86,36	87,84	88,62				
16	BRMP Tanaman Industri dan Penyegar	Tahunan	Pengujian Standar Instrumen	14	87,5	85,71	85,71	91,07	87,5	91,07	87,5	82,14	87,5	87,30	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Sosialisasi kanal pengaduan yang tersedia	100%
			Pengelolaan Produk Instrumen	8	90,83	85,83	85,83	88,33	85,83	88,33	88,33	85,83	85,83	87,22				
			Diseminasi Standardisasi Instrumen	102	88,92	94,38	94,98	87,58	89,35	95,74	95,63	91,12	90,19	91,99				
				124	89,08	88,64	88,84	88,99	87,56	91,71	90,49	86,36	87,84	88,84				
17	BRMP Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tahunan	Informasi dan Konsultasi Inovasi Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan	419	89,14	89,2	92,48	100	89,02	91,47	89,5	92,96	95,47	92,14	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Standar Produk Layanan melalui FKP	100%
			Perpustakaan	49	94,39	94,39	97,96	100	91,33	93,37	94,9	98,47	91,84	95,18				
				468	91,76	91,79	95,22	100	90,17	92,42	92,20	95,71	93,65	92,46				
18	BRMP Unggas dan Aneka Ternak	Tahunan	Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	7	96,5	96,5	75	100	100	92,75	89,25	96,5	100	94,06	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi standar waktu pelayanan, penambahan sarpras	100%
			Bibit Sumber	102	94	89,75	82,5	100	89,75	90,25	92	90,75	92,75	91,31				
			Kunjungan/ Magang/PKL	14	98,25	94,75	78,5	100	100	82,25	89,25	91	98,25	92,47				
				123	94,75	90,75	81,75	100	91,50	89,50	91,50	91,00	94,75	91,58				
19	BRMP Ruminansia Besar	Tahunan	Informasi Konsultasi Teknologi Sapi Potong	28	94,64	93,75	92,86	93,75	93,75	90,18	94,64	92,86	91,96	93,15	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Sosialisasi standar waktu pelayanan	100%
			Analisis Laboratorium	14	92,86	82,14	80,36	91,07	80,36	92,86	98,21	98,21	87,5	89,29				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
20	BRMP Ruminansia Kecil	Tahunan	m												Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Evaluasi prosedur layanan	0%
			PKL	89	89,61	89,61	87,36	87,36	88,2	91,85	92,42	99,72	97,01	91,46				
				131	91,30	89,70	87,79	89,12	88,55	91,60	93,51	98,09	90,84	91,05				
			UPBS	22	89,75	87,5	89,75	95,45	87,5	88,62	93,17	100	92,05	91,53				
			Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	5	95	85	85	95	85	95	95	95	100	92,22				
21	BRMP Veteriner	Tahunan	Pendayagunaan Hasil	141	89,55	86,17	87,77	93,07	87,6	86,52	93,07	87,4	99,47	90,07	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Penambahan SDM, Sosialisasi standar waktu	100%
				168	91,43	86,22	87,50	88,52	86,70	90,04	93,74	94,13	97,17	90,24				
			Laboratorium (Unit Diagnostik)	100	84,41	85,64	83,66	82,43	85,64	88,86	88,86	97,52	86,39	87,05				
			Diseminasi (Magang, Kunjungan, Perpustakaan)	72	87,32	87,32	88,03	93,31	87,68	90,14	91,9	97,89	89,79	90,38				
				172	85,61	86,34	85,47	86,92	86,48	89,39	90,12	97,67	87,79	88,42				
22	BRMP Mektan	Tahunan	Jasa Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	173	94,8	86,42	85,55	87,72	91,18	88,44	90,9	91,62	87,14	89,31	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Digitalisasi sistem layanan, penetapan standar waktu pelayanan, serta monitoring ketepatan waktu secara rutin	0%
			Penyebarnya Hasil Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	152	94,08	91,94	91,61	91,78	92,76	92,11	93,59	93,91	91,94	92,64				
				325	94,44	89,18	88,58	89,75	91,97	90,28	92,25	92,77	89,54	90,97				
			Informasi dan Konsultasi	158	97,25	95,75	97,25	93,75	97,25	96,75	96,25	99,5	95,25	96,56				
			Pengujian Terstandar	55	98,75	96,75	98,75	93,25	98,75	99,5	99	100	99	98,19				
23	BRMP Biogen	Tahunan	Benih Terstandar	35	98,5	95	94,25	83,5	97,75	97,75	99,25	99,25	100	96,14	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi pengenalan biaya	100%

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon de n	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perba ikan	RTL	% TL Periode Sebelu mnya
			Bank Gen Pertanian	6	100	95,75	100	100	95,75	100	95,75	100	100	98,58				
			Penyebaru asan Standar	253	86,75	85,5	85,25	95,25	86	88,25	91,75	99,25	99	90,78				
			Perpustaka an	102	98,75	97,75	96,5	96,25	96,25	99	98,75	99,25	97,5	97,78				
				609	96,75	94,50	95,25	93,75	95,25	97,00	96,75	99,50	98,50	96,33				
24	BRMP Pascapane n	Tahunan	Penilaian Kesesuaian	201	88	88	87	100	88,1	88,48	88,2	99,23	87,7	90,52	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Sosialisasi waktu standar, pengusulan perbaikan alat	100%
			Pendayagunaan Hasil	133	86,75	86,75	85,48	96,25	86,38	87,28	86,98	98,8	86,23	88,99				
				334	86,75	86,75	85,48	96,25	86,38	87,28	86,98	98,80	86,23	88,90				
25	BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian	Tahunan	Konsultasi	139	82,01	82,73	81,12	88,31	82,01	81,83	85,07	83,09	91,6	84,20	Hybrid (Manual dan Online)	Persyaratan	Pelaksanaan FKP, penyusunan panduan persyaratan	75%
			kunjungan dan Studi Banding	22	86,36	85,23	84,09	90,91	85,23	85,23	87,5	87,5	96,59	87,63				
			Magang	148	85,47	85,47	83,78	90,54	85,14	85,98	87,84	86,66	95,28	87,35				
			Perpustakaan	37	89,19	87,16	84,46	90,54	85,81	85,81	87,16	85,81	95,27	87,91				
			Kerjasama	26	85,58	85,58	84,62	87,5	83,65	83,65	83,65	85,58	96,15	86,22				
			Pemohonan Publikasi	7	85,71	85,71	85,71	85,71	82,14	82,14	85,71	85,71	96,43	86,11				
			Peta	42	88,1	87,5	83,93	89,29	87,5	87,5	86,9	86,9	96,43	88,23				
			Bimbingan Teknis	615	85,51	84,76	83,5	90,43	85,12	85,12	85,08	84,76	95,04	86,59				
			Fitur Layanan Informasi	470	83,35	82,93	81,76	88,99	83,19	83,19	83,19	86,67	94,79	85,34				
				1506	84,53	87,63	87,46	87,91	86,90	86,90	88,03	86,54	95,29	86,69				
26	BRMP Tanah dan Pupuk	Tahunan	Pengujian, Penilaian Kesesuaian , serta Pendayagunaan Hasil	899	86,32	89,15	88,54	88,57	85,82	87,32	90,68	84,29	94,1	88,31	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Sosialisasi penyediaan kanal pengaduan	100%
				899	86,32	89,15	88,54	88,57	85,82	87,32	90,68	84,29	94,10	88,31				
27	BRMP Lahan Rawa	Tahunan	Laboratorium	10	82,5	82,5	77,5	72,5	80	85	82,5	87,5	100	83,33	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi terhadap durasi penyelesaian	100%
			Kunjungan	7	85,71	78,57	78,57	92,86	89,29	85,71	89,29	89,29	96,43	87,30				
			Magang	10	77,5	75	75	100	75	77,5	87,5	77,5	95	82,22				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Perpustakaan	11	77,27	81,82	75	79,55	77,27	75	77,27	77,27	90,91	79,04			aian, optimalisasi penggunaan sistem digital	
			Informasi	180	81,81	80,97	77,78	92,92	80,83	82,22	84,44	82,78	94,58	84,26				
			Bimtek	36	81,94	78,47	80,56	91,67	80,56	81,94	83,33	81,25	89,58	83,26				
				254	81,59	80,41	77,95	91,63	80,61	81,89	84,15	82,48	94,00	83,86				
28	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tahunan	Magang	66	83,71	83,33	83,33	91,29	83,33	84,47	84,85	95,45	88,64	86,49	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			Kunjungan/ Agroedukasi	18	79,17	79,17	79,17	88,89	77,78	79,17	80,56	94,44	79,17	81,95				
			Bimbingan Teknis/Konsultasi	184	86,55	86,55	84,78	93,89	84,65	86,14	86,68	95,38	85,19	87,76				
			Informasi	15	85,71	91,07	85,71	92,86	85,71	87,5	91,07	100	94,64	90,47				
				283	85,37	85,55	84,13	92,91	83,95	85,37	86,08	95,57	86,08	87,22				
29	BRMP Lingkungan Pertanian	Tahunan	Magang	43	91,86	90,7	89,53	85,47	90,7	92,44	94,19	91,86	90,12	90,76	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi waktu pelayanan serta SOP	100%
			Kunjungan/ Agroedukasi	87	87,36	86,49	83,62	85,34	86,49	88,51	88,51	85,06	90,23	86,85				
			Bimbingan Teknis/Konsultasi	115	88,91	88,26	86,96	89,35	87,39	89,78	91,3	87,83	89,13	88,77				
			Informasi	102	86,03	85,54	85,29	86,79	85,54	85,29	88,24	86,03	93,63	86,93				
				347	88,04	87,32	85,95	87,10	87,03	88,47	90,06	87,10	90,85	87,11				
30	BRMP Penerapan	Tahunan	Agro Modern	112	89,96	88,39	87,05	95,31	89,29	91,07	95,31	88,62	86,61	90,18	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pemanfaatan TI serta penyediaan alternatif sarpras	100%
			Magang/PKL	41	89,63	92,07	92,07	94,51	86,59	89,63	92,07	91,46	85,98	90,45				
			Pendampingan	35	92,86	93,57	87,14	100	92,86	95,71	96,43	86,43	90	92,78				
			Konsultasi/ Rekomendasi	11	88,64	88,64	90,91	90,91	90,91	95,45	93,18	90,91	88,64	90,91				
				199	90,28	90,67	89,29	95,18	89,91	92,97	94,25	89,36	87,81	90,72				
31	BRMP Aceh	Tahunan	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Penyediaan media pengaduan	0%
			UPBS	15	95,67	93,58	89,42	91,5	91,51	93,58	95,67	89,42	93,58	92,66				
			Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
			Magang	47	94,32	93,52	91,1	92,71	93,52	91,9	92,71	91,9	91,9	92,53				
			Perpustakaan	32	94	92,33	92,33	92,33	92,34	94	94	92,33	92,33	92,89				
			Konsultasi	9	97,22	94,44	94,44	91,67	97,22	97,22	94,44	88,88	91,67	94,13				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
				103	95,30	93,47	91,82	92,05	93,65	94,18	94,21	90,63	92,17	93,05				
32	BRMP Sumatera Utara	Tahunan	Layanan pendampingan, diseminasi dan penilaian kesesuaian	179	94,2	94,06	87,38	88,75	94,62	93,64	98,81	93,22	96,3	93,44	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi dan penyempurnaan SOP Pelayanan	0%
				179	94,20	94,06	87,38	88,75	94,62	93,64	98,81	93,22	96,30	93,44				
33	BRMP Sumatera Barat	Tahunan	Pustaka	10	96,5	94	91,5	100	96,5	96,5	94	96,5	86,5	94,67	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana	100%
			Agro Modern	28	92,5	95,25	98	100	95,25	97	96,25	99,75	84,5	95,39				
			Laboratorium	21	91,75	88,25	98,75	100	96,5	96,5	96,5	100	88,25	95,17				
			UPBS	19	92,25	90,75	92,25	100	96	92,25	100	100	88,25	94,64				
			Magang	23	87,5	92	94,25	100	96,25	96,25	100	100	87,5	94,86				
			Pendampingan	26	92,5	88,5	97,25	100	95,25	93,5	96,25	100	85,75	94,33				
			Konsultasi	24	91,5	89,5	91,5	100	96,75	93,75	100	97,75	91,5	94,69				
			Lainnya	9	97,22	91,67	94,44	100	88,89	94,44	100	97,22	88,89	94,75				
				160	92,72	91,24	94,74	100	95,17	95,02	97,88	98,90	87,64	94,81				
34	BRMP Bengkulu	Tahunan	UPBS	14	91	96,5	92,75	96,5	89,25	96,5	100	94,5	100	95,22	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Pelatihan terhadap penanganan pengaduan, penerapan reward dan punishment berbasis umpan balik pengguna	100%
			Laboratorium	21	92,25	94,5	92,25	100	92,25	95,75	97	88,75	100	94,75				
			Perpustakaan	10	95	100	92,5	90	90	95	95	85	100	93,61				
			Taman Agromodern	37	97	99,75	93,75	93,75	91,75	95,75	95	93	98,5	95,36				
			Magang Siswa/ Mahasiswa	9	91,67	97,22	91,67	100	97,22	94,44	88,89	97,22	100	95,37				
			Pelatihan/Bimtek	26	92,5	93,5	91,5	94,5	95,5	94,5	96,5	97,5	100	95,11				
			Ternak Unggas	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			Konsultasi	13	96,25	94,25	98,25	100	98,25	98,25	92,5	88,5	90,5	95,19				
			Informasi Publik	26	96,25	95,25	99,25	99,25	98,25	97,25	95,25	90,5	91,5	95,86				
				157	94,66	96,77	94,66	97,11	94,72	96,38	95,57	92,77	97,83	95,61				
35	BRMP Riau	Tahunan	UPBS	38	96,05	97,37	94,08	94,08	95,39	96,71	95,39	96,05	93,42	95,39	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Pelaksanaan FKP	100%
			Laboratorium	8	87,5	90,63	87,5	100	87,5	87,5	93,75	90,63	100	91,67				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Perpustakaan	23	89,61	89,61	87,43	100	86,35	87,43	92,87	89,61	100	91,43	Online)			
			Taman Agromodern	87	96,22	96,51	95,93	97,67	92,44	95,06	95,06	92,73	86,34	94,22				
			Magang Siswa/ Mahasiswa	68	89,35	88,99	87,15	100	86,78	90,46	93,03	89,72	100	91,72				
			Pelatihan/B imtek	49	92,35	92,35	89,8	92,35	94,39	99,49	92,35	91,33	93,37	93,09				
			Ternak Unggas	8	93,75	93,75	87,5	90,63	90,63	96,88	100	96,88	100	94,45				
			Konsultasi	6	95,83	91,67	95,83	95,83	91,67	91,67	83,33	100	100	93,98				
			Informasi Publik	20	94,25	94,25	91,75	91,75	93	90,5	96,75	99,25	100	94,61				
				307	92,77	92,79	90,77	95,81	90,91	92,86	93,61	94,02	97,01	93,40				
36	BRMP Jambi	Tahunan	Perpustakaan	5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95,00	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Pelaksanaan FKP	100%
			Taman Agromodern	25	91	88	92	91	90	91	93	98	97	92,33				
			Laboratorium	31	94,14	94,86	92,71	94,86	91,29	94,14	95,57	96,29	94,86	94,30				
			UPBS	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			Magang Siswa/ Mahasiswa	29	91,37	97,41	89,65	94,83	84,48	89,65	91,37	96,55	89,65	91,66				
			Pendampingan	14	93,07	93,07	86,93	98,43	91,29	94,86	98,64	91,29	87,71	92,81				
			Konsultasi	21	92,1	93,29	94,48	95,67	89,71	89,71	95,67	98,05	84,95	92,63				
			Informasi Publik	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
				128	94,59	95,20	93,85	96,22	92,72	94,30	96,16	96,90	93,65	94,84				
37	BRMP Sumatera Selatan	Tahunan	UPBS	12	95,5	95,5	93,5	93,5	87,25	95,5	99,75	93,5	93,5	94,17	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi biaya layanan	100%
			Laboratorium	6	95,83	95,83	100	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	100	95,83				
			Perpustakaan	5	90	95	90	95	95	90	95	90	100	93,33				
			Taman Agromodern	48	94	94	95	92	94,5	94	95,5	94,5	93,5	94,11				
			Magang	17	90,25	90,25	90,25	88,75	90,25	90,25	90,25	90,25	88,75	89,92				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Siswa/ Mahasiswa															
			Pelatihan/B imtek	225	94,25	94,75	94,75	93,5	94,5	95,5	96	94,75	94,75	94,75				
			Ternak Unggas	7	100	92,86	96,43	96,43	96,43	96,43	96,43	92,83	92,83	95,63				
			Konsultasi	7	96,43	96,43	92,83	92,83	92,83	92,83	100	96,43	96,43	95,23				
			Informasi Publik	18	94	92,5	92,5	91	94	92,5	96,75	95,25	95,25	93,75				
				345	94,47	94,12	93,92	93,20	93,40	93,65	95,71	93,24	95,00	94,08				
38	BRMP Lampung	Tahunan	Perpustakaan	12	94,75	96,83	96,83	96,83	90,58	88,5	98,92	94,75	86,42	93,82	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pengusulan perbaikan/ penambahan sarpras	100%
			Agro Modern	35	89,86	98,43	97,71	100	97,71	90,57	97,71	97	89,14	95,35				
			UPBS	11	95,45	95,45	93,18	97,73	93,18	94,45	93,18	97,73	90,91	94,58				
			Pengujian Laboratorium	11	90,64	99,73	97,45	90,64	97,45	92,91	99,73	97,45	86,09	94,68				
			Pendamping (PKL)	27	93,52	97,22	97,22	98,15	97,22	95,37	95,37	100	91,67	96,19				
			Pendamping (TOT)	17	92,65	95,59	97,06	100	94,12	86,76	98,53	95,59	92,65	94,77				
			Konsultasi	24	88,46	94,71	96,79	97,83	95,75	91,58	98,88	96,79	91,58	94,71				
				137	92,19	96,85	96,61	97,31	95,14	91,45	97,47	97,04	89,78	94,87				
39	BRMP Jawa Barat	Tahunan	Bimbingan Teknis/Konsultasi	114	92,32	92,32	97,15	88,15	89,69	92,1	92,98	91	96,92	92,51	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Pelaksanaan FKP	100%
			UPBS	79	97,25	96,3	100	91,56	90,29	93,77	94,09	92,19	99,47	94,99				
			PKL/Magang	32	93,06	93,84	99,34	89,94	91,5	96,19	95,41	89,16	100	94,27				
				225	94,21	94,15	98,83	89,88	90,49	94,02	94,16	90,78	98,80	93,93				
40	BRMP Jakarta	Tahunan	Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	8	93,75	87,5	100	87,5	90,63	93,75	100	87,5	100	93,40	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Evaluasi SOP layanan	0%
			Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ PKL	72	92,36	90,28	99,31	88,19	92,36	95,13	96,18	91,32	99,65	93,86				
			Kunjungan	60	95	88,33	100	87,5	92,08	95,41	99,16	93,33	96,25	94,12				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			Agro Modern															
				140	93,70	88,70	99,77	87,73	91,69	94,76	98,45	90,72	98,63	93,80				
41	BRMP Jawa Tengah	Tahunan	Pustaka	20	92,5	95	93,75	90	92,5	95	97,5	92,5	95	93,75	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi standar biaya	100%
			Agromodern	20	93,75	93,75	93,75	92,5	93,75	91,25	92,5	93,75	100	93,89				
			Laboratorium	20	93,75	93,75	95	93,75	90	93,25	93,75	93,75	100	94,11				
			UPBS	20	97,5	97,5	90	91,25	92,5	96,25	96,25	92,5	96,25	94,44				
			Magang	20	91,25	93,75	88,75	90	93,75	95	98,75	90	100	93,47				
			Pendampingan	20	97,5	95	90	91,25	93,75	98,75	96,25	95	100	95,28				
			Konsultasi	20	91,25	88,75	91,25	95	91,25	96,25	95	92,5	100	93,47				
			Lainnya	28	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	95	92,5	100	93,61				
				168	93,75	93,75	91,88	92,03	92,50	94,78	95,63	92,81	98,91	94,00				
42	BRMP Yogyakarta	Tahunan	Perpustakaan	68	96	91,5	89	89	94	94	95	99,26	91,5	93,25	Hybrid (Manual dan Online)	Biaya	Sosialisasi standar biaya	0%
			Agromodern	25	92	92	87	91	95	93	95	96	95	92,89				
			Laboratorium	80	97,5	96	93	93	93,5	93,5	94,5	100	92,5	94,83				
			UPBS	16	98	93,5	93	93	97,5	92,5	95,5	100	95	95,33				
			Magang/ PKL Siswa Mahasiswa	75	97,5	93,5	89	89	93,5	93,5	97,5	99	93,5	94,00				
			Pendampingan	68	97,5	92	88,5	88,5	95	95	95	98,89	95	93,93				
			Konsultasi	106	97,5	90	86,5	90	94	94	95,5	99,52	94	93,45				
			Lainnya	54	97	91	88	90	93,5	93,5	98,5	99,07	93,5	93,79				
				492	96,63	92,44	89,25	90,44	94,50	93,63	95,81	98,97	93,75	93,93				
43	BRMP Jawa Timur	Tahunan	Layanan pendampingan, diseminasi dan penilaian kesesuaian	209	93	92	93,25	92,75	91,75	95,57	95	89	92,5	92,76	Hybrid (Manual dan Online)	Aduan	Sosialisasi ketersediaan kanal pengaduan serta prosedur nya	100%
				209	93,00	92,00	93,25	92,75	91,75	95,57	95,00	89,00	92,50	92,76				
44	BRMP Bali	Tahunan	Pendampingan, penerapan, dan	143	92,89	93,94	95,51	100	92,36	93,76	98,13	92,36	89,74	94,30	Hybrid (Manual dan Online)	Persyaratan	Evaluasi dan sosialisasi	100%

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
			diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi														persyaratan layanan	
			Benih/bibit sumber spesifik lokasi	15	88,33	96,67	93,33	96,67	93,33	93,33	91,67	95	96,67	93,89				
			Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
				158	90,61	95,31	94,42	98,34	92,85	93,55	94,90	93,68	93,21	94,09				
45	BRMP Nusa Tenggara Barat	Tahunan	Laboratorium Pengujian	57	90,5	93,75	91,25	94	93,5	96	94	96	93	93,56	Hybrid (Manual dan Online)	Persyaratan	Sosialisasi dan evaluasi persyaratan	100%
			UPBS Ternak	37	92,25	93,5	92,25	95,25	93,25	95,25	95,25	94,25	92,5	93,75				
			UPBS Tanaman	51	92	95,75	94,75	93	95,75	94,75	95,75	95,75	94,75	94,69				
			Publik dan Humas	47	95,75	93,25	95,75	95	93,25	95	93,25	96	94,75	94,67				
			Diseminasi	37	93,5	93,75	94,5	95,25	94	95,5	93,25	95,5	96	94,58				
				229	92,80	94,00	93,70	94,50	93,95	95,30	94,30	95,50	94,20	94,25				
46	BRMP Nusa Tenggara Timur	Tahunan	Informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian	19	90,75	90,75	85,5	100	89,5	93,5	93,5	96	85,5	91,67	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pengusulan pengadaan sarana dan prasarana	100%
			UPBS	3	83,33	83,33	100	83,33	91,67	91,67	91,67	91,67	83,33	88,89				
			Laboratorium	18	95	93,75	91	75,25	93,75	91	95	97,75	86,75	91,03				
			Perpustakaan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			Visitor Plot	7	92,86	92,86	89,29	100	92,86	92,86	92,86	92,86	89,29	92,86				
			Magang/Pe latihan/PKL	44	90,91	90,91	89,77	100	89,77	89,77	91,47	98,29	88,64	92,17				
			Kerjasama	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
				94	93,26	93,09	93,65	94,08	93,94	94,11	94,93	96,65	90,50	93,80				
47	BRMP Sulawesi	Tahunan	Layanan pendamping	53	87,67	88,63	89,89	98,00	92,71	92,44	93,77	99,00	90,28	92,49	Hybrid (Manual)	Persyaratan	Sosialisasi	0%

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
	Utara		gan, diseminasi dan penilaian kesesuaian												dan Online)		persyaratan layanan	
				53	87,67	88,63	89,89	98,00	92,71	92,44	93,77	99,00	90,28	92,49				
48	BRMP Sulawesi Tengah	Tahunan	Konsultasi dan Rekomendasi Informasi	245	87,53	85,49	83,96	99	85,39	85,9	87,84	100	93,76	89,87	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Penyusunan jadwal pemberian layanan	0%
			Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ PKL	74	87,85	86,81	84,47	97,31	84,16	86,5	89,88	100	87,85	89,43				
			Perpustakaan	13	89,38	89,38	91,31	100	89,38	93,23	93,23	100	93,23	93,24				
			Agroeduwisata	15	90,67	85,67	84	97,33	85,67	87,33	89	100	85,67	89,48				
			UPBS Pemberlian	5	100	100	95	95	100	100	100	100	100	98,89				
			UPBS Bantuan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
				353	92,57	91,23	89,79	98,11	90,77	92,16	93,33	100	93,42	93,48				
49	BRMP Sulawesi Selatan	Tahunan	Pengujian Laboratorium	13	94,62	98,62	94,62	81,15	94,62	98,46	100	100	94,62	95,19	Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Evaluasi dan penyederhanaan prosedur layanan	30%
			Konsultasi	47	95,38	89,53	89,53	98,04	92,72	92,19	95,38	100	91,66	93,83				
			Bimbingan Teknis/Pelatihan	10	88,5	86	91	98,5	91	93,5	96	100	91	92,83				
			Magang/PKL	49	94,65	94,65	95,67	100	95,67	96,18	98,73	100	95,67	96,80				
			Perpustakaan	10	99	94	96,5	99	94	96,5	100	100	99	97,56				
			Kunjungan Agro Eduwisata	101	91,62	89,89	90,63	95,83	90,14	92,86	96,33	100	93,11	93,38				
			UPBS	8	96,88	87,5	90,63	93,75	90,63	93,75	90,63	100	96,88	93,41				
			Informasi Publik	3	83,33	91,67	91,67	100	83,33	91,67	91,67	100	83,33	90,74				
				241	93,00	91,48	92,53	95,78	91,51	94,39	96,09	100	93,16	94,22				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon de n	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
50	BRMP Sulawesi Tenggara	Tahunan	Konsultasi	3	91,67	100	100	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	93,52	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana	0%
			Bimbingan Teknis/Pelatihan	5	95	90	95	100	95	95	95	95	90	94,44				
			Magang/PKL	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			Perpustakaan	3	91,67	91,67	91,67	83,33	91,67	91,67	91,67	91,67	83,33	89,82				
			Kunjungan Agro Eduwisata	105	91,54	92,17	91,19	92,42	94,93	91,25	92,53	97,41	91,59	92,51				
			UPBS	6	95,83	87,5	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	83,33	91,67				
				125	94,29	93,56	95,62	93,18	94,00	93,54	93,76	95,26	89,99	93,69				
51	BRMP Kalimantan Tengah	Tahunan	Bimtek	88	87,4	85,69	84,27	97,34	86,83	88,82	89,95	97,91	84,56	89,20	Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Evaluasi SOP layanan	100%
			Konsultasi dan Kunjungan	36	85,64	87,03	86,33	94,67	85,64	87,03	88,42	100	84,94	88,86				
			Magang	20	89,75	86	91	98,5	88,5	94,75	92,25	98,5	96	92,81				
			Perpustakaan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			UPBS	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
52	BRMP Kalimantan Barat	Tahunan		147	92,56	91,74	92,32	98,10	92,19	94,12	94,12	99,28	93,10	94,17	Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Monitoring penerapan SOP pelayanan	0%
			Pendampingan, Pengujian, Penerapan, dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	19	91,5	92,75	91,5	100	91,5	88,75	88,75	89,5	95,5	92,19				
			Penilaian Kesesuaian	8	100	90,63	100	96,86	90,63	96,86	90,63	90,63	90,63	94,10				
			Benih/bibit sumber spesifik lokasi	3	83,33	91,67	91,67	100	100	91,67	91,67	91,67	100	93,52				
			Pendukung	44	94,5	83,75	93,5	97	91,25	94,5	95,75	93,75	92,25	92,92				
53	BRMP Kalimantan	Tahunan		74	92,33	89,70	94,17	98,47	93,35	92,95	91,70	91,39	94,60	93,18	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Penggunaan TI	100%
			Perpustakaan	18	94,28	88,72	84,56	100	91,5	88,72	97,06	88,72	90,11	91,52				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
	Timur		Taman Agro Inovasi	94	94,17	95,5	93,11	101,6	93,9	97,1	98,69	96,03	93,9	96,00	dan Online)		dalam layanan	
			Kebun Percobaan	37	92,51	94,54	93,87	97,24	92,51	95,22	97,24	94,54	93,87	94,62				
			Administrasi	20	93,75	97,5	98,75	103,8	96,25	101,3	98,75	97,5	97,5	98,33				
			Laboratorium	46	98,05	86,61	90,41	94,22	87,15	94,76	98,02	90,41	89,87	92,17				
			UPBS dan Lainnya	24	96,71	93,58	91,5	97,75	92,54	98,79	94,63	93,58	94,63	94,86				
				239	94,91	92,74	92,03	99,10	92,31	95,97	97,40	93,47	93,31	94,58				
54	BRMP Kalimantan Selatan	Tahunan	Perpustakaan	13	87,5	87,5	100	87,5	100	100	87,5	100	100	94,44	Hybrid (Manual dan Online)	Persyaratan	Sosialisasi persyaratan layanan	0%
			Perbenihan	37	89,5	95,75	83,25	95,75	90,5	96,75	90,5	90,5	100	92,50				
			Konsultasi	49	91,75	90	90	100	86,75	92,75	92,75	91	100	92,78				
			Lainnya	18	92,5	89,75	88,25	95,75	89,25	93,25	95,75	92,5	100	93,00				
				117	90,31	90,75	90,38	94,75	91,63	95,69	91,63	93,50	100	93,18				
55	BRMP Maluku	Tahunan	UPBS	9	100	94,44	100	97,22	94,44	97,22	97,22	94,44	91,67	96,29	Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Evaluasi SOP layanan	100%
			Laboratorium	5	100	90	100	95	90	95	95	90	95	94,44				
			Perpustakaan	10	100	92,5	100	92,5	95	95	95	97,5	97,5	96,11				
			Agromodern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
			Magang/PKL	30	98,25	96,75	100	94,25	95	98,25	98,25	98,25	97,5	97,39				
			Konsultasi	39	94,75	91,75	100	94,75	94,25	94,75	96,25	95,5	96,25	95,36				
			Pendampingan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
			Lainnya	15	96,75	90	100	98,25	98,25	100	95	98,25	100	97,39				
				109	97,50	95,00	100	95,75	95,75	97,00	97,75	97,50	98,00	97,14				
56	BRMP Papua	Tahunan	Konsultasi/Koordinasi	59	89,83	90,25	91,95	97,46	90,68	91,95	95,76	93,22	96,61	93,08	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	100%
			Diseminasi	25	93	93	92	94	92	95	96	93	100	94,22				
			Laboratorium	17	95,59	94,12	91,18	89,71	88,24	88,24	94,12	92,65	95,59	92,16				
			UPBS	6	87,5	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	100	93,52				
			Sosialisasi/Kunjungan	23	90,52	97,04	97,04	98,13	93,78	94,87	97,04	94,87	91,61	94,99				
				130	91,29	94,05	93,60	94,19	91,27	92,35	94,92	93,91	96,76	93,59				
57	BRMP	Tahunan	Perpustakaan	73	91,75	94,5	90,75	96	92,5	93,5	95,5	97,5	94	94,00	Hybrid	Waktu	Peningk	100%

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon de n	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perba ikan	RTL	% TL Periode Sebelu mnya
	Banten		an												(Manual dan Online)		atan kapasita s petugas layanan	
			Taman Agromoder n	73	93,5	94,5	90,5	96	92,25	93,25	95,5	97,5	92,75	93,97				
			Magang/PK L	72	93,25	94,25	90,25	96	92	93	95,5	97,5	93,75	93,94				
				218	92,83	94,42	90,50	96,00	92,25	93,25	95,50	97,50	93,50	93,97				
58	BRMP Bangka Belitung	Tahunan	Kunjungan Agro Modern	30	94,17	92,5	92,5	97,5	94,17	92,5	91,67	95	95	93,89	Hybrid (Manual dan Online)	Waktu	Penguat an digitalisa si dan sistem e- tracking status layanan. Monitori ng ketat terhadap SLA	0%
			UPBS	19	93,42	92,11	89,47	94,74	90,79	93,42	92,11	94,74	93,42	92,69				
			Magang/Pr akerin	18	94,44	91,67	91,67	95,83	95,83	95,83	94,44	93,06	97,22	94,44				
			Konsultasi	26	93,42	92,46	91,5	98,23	93,42	92,46	91,5	91,42	95,31	93,30				
			Lainnya	45	92,56	90,89	90,33	100	89,78	91,44	94,78	100	93,67	93,72				
				138	93,60	91,92	91,09	97,26	92,80	93,13	92,90	94,84	94,92	93,61				
59	BRMP Gorontalo	Tahunan	Pustaka	10	98,5	96	93,5	100	96,5	98,5	96	98,5	88,5	96,22	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpr as	Pemelih araan dan peningka tan kualitas sarana dan prasaran a	100%
			Agromoder n	28	92,5	94,25	98	100	95,25	97	96,25	99,75	90	95,89				
			Laboratoriu m	21	90,75	87,25	97,75	100	95,5	95,5	95,5	100	89,25	94,61				
			UPBS	19	93,25	91,75	93,25	100	97	93,25	100	100	89,25	95,31				
			Magang	23	93	91	93,25	100	95,25	95,25	99,75	100	90	95,28				
			Pendampin gan	26	93,5	91,5	98,25	100	96,25	94,5	97,25	100	86,75	95,33				
			Konsultasi	24	91,5	89,5	91,5	100	96,75	93,75	100	97,75	91,5	94,69				
			Lainnya	9	94,44	91,67	94,44	100	88,89	91,67	100	97,22	88,89	94,14				
				160	93,43	91,62	94,99	100	95,17	94,93	98,09	99,15	89,27	95,18				
60	BRMP Maluku Utara	Tahunan	Perpustaka an	54	94,25	91,5	90,25	100	94,25	95,75	93	94,25	90,25	93,72	Hybrid (Manual dan Online)	Persy aratan	Sosialisa si persyara tan layanan	100%
			Magang/PK L	54	88,5	91,5	90,5	100	93,75	94,75	95,75	93,75	87,5	92,89				
			Konsultasi	31	88,5	92,5	91,25	100	94	94	95,25	94	92,5	93,56				
			Informasi Pertanian/ Permohonan Benih	124	85,5	95	89,75	100	91,25	94	95,25	94	90	92,75				
			Informasi Publik Non Pertanian	17	87,25	91	91,5	100	90,75	91,5	94	94,5	90,25	92,31				

No	UPP	Periode	Jenis Layanan	Respon de n	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
				280	88,80	92,30	90,65	100	92,80	94,00	94,65	94,10	90,10	93,04				
61	BRMP Papua Barat	Tahunan	Layanan pendampingan, diseminasi dan penilaian kesesuaian	92	95,4	95,95	95,95	96,85	94,4	95,23	95,95	97,03	93,85	95,62	Hybrid (Manual dan Online)	Sarpras	Pengusulan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana	100%
				92	95,40	95,95	95,95	96,85	94,40	95,23	95,95	97,03	93,85	95,62				
62	BRMP Sulawesi Barat	Tahunan	UPBS	15	90,25	93,75	93,75	90,00	90,25	92,00	88,75	95,25	95,25	92,14	Hybrid (Manual dan Online)	Prosedur	Evaluasi dan penyederhanaan SOP layanan	100%
			Perpustakaan	2	100	100	87,50	100	87,50	87,50	100	100	87,50	94,44				
			PKL/Bimtek /Magang / Pelatihan	44	92,50	86,75	90,75	92,50	91,25	95,25	95,00	100	93,00	93,00				
			Koordinasi	19	96,00	92,00	92,00	97,25	96,00	92,00	93,50	98,75	92,00	94,39				
			Konsultasi dan Rekomendasi	16	86,50	91,00	86,50	97,25	89,75	91,00	100	100	86,50	92,06				
			Lainnya	4	81,25	87,50	100	93,75	87,50	100	93,75	87,50	93,75	91,67				
				100	91,08	91,83	91,75	95,13	90,38	92,96	95,17	96,92	91,33	92,95				
63	BRMP Kepulauan Riau	Tahunan	Narasumber	92	90,34	89,52	90,07	97,40	90,34	90,78	94,14	91,42	96,04	92,23	Hybrid (Manual dan Online)	Produk	Sosialisasi Produk Layanan	60%
			Konsultasi	86	93,86	94,73	93,28	94,73	92,12	94,73	95,60	92,12	94,44	93,96				
			Magang/Prakerin	6	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	87,50	92,59				
			Kunjungan Taman Agromodern	8	96,88	96,88	96,88	90,63	90,63	93,75	96,88	96,88	90,63	94,45				
			Koordinasi	29	94,83	94,83	93,10	100	96,55	96,55	95,69	94,83	99,14	96,17				
			Benih Sumber	23	93,48	91,30	92,39	97,83	92,39	93,48	95,65	92,39	100	94,32				
				244	94,20	93,85	93,59	95,38	92,28	93,49	94,94	93,22	94,63	93,95				
		BRMP		17509	91,51	91,05	90,83	93,32	90,70	92,13	93,23	93,77	92,35		92,10			77%

Lampiran 17. Rincian Hasil Survei Kepuasan Eselon II Terhadap Pelayanan Sekretariat BRMP Tahun 2025

	Hasil Survei Kepuasan Es II thd Pelayanan Sekretariat BRMP Tahun 2025							
	Persyaratan layanan	Prosedur pelayanan	Kecepatan pelayanan	Kesesuaian produk layanan	Kompetensi petugas	Perilaku petugas	Penanganan pengaduan	Sarana dan prasarana
Sangat Tidak Puas	2	1	1	1	1	1	1	1
Tidak Puas	1	0	2	1	1	0	1	0
Puas	54	53	57	54	51	39	56	52
Sangat Puas	42	45	39	43	46	59	41	46
Total Responden	99	99	99	99	99	99	99	99

Lampiran 18. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI)
BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FABURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

RADJY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 19. Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat BRMP TA 2025 (OMSPAN 13 Januari 2026)

Satker	Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi		
					Rp	% Pagu Total	% Pagu Efektif
Sekretariat BRMP	Belanja Pegawai	9.120.491.000		9.120.491.000	9.103.638.848	99,82%	99,82%
	Belanja Barang	84.297.556.000	2.000.871.000	82.296.685.000	81.261.961.944	96,40%	98,74%
	Belanja Modal	141.735.000		141.735.000	141.200.000	99,62%	99,62%
	TOTAL	93.559.782.000	2.000.871.000	91.558.911.000	90.506.800.792	96,74%	98,85%



AGRO MODERN